



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

TAHUN 2023



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu disusun untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen laporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

KETIGA . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

- KETIGA : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 18 Maret 2024
PJ. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,
SIRAJUDDIN LASENA



Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
f.	f

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 123 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA TAHUN 2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEPRI PONTOH**
Jabatan : Bupati Bolaang Mongondow Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Boroko, Januari 2023
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


DEPRI PONTOH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,55
	1.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,20
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,34
3. Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	9,92
	3.2. Gini Ratio	Poin	0,33
4. Menurunnya beban pengeluaran keluarga	4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00
	4.2. Persentase Keluarga Sejahtera	%	45,00
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	5.1. Opini BPK	Predikat	WTP
	5.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Tinggi
6. Meningkatnya pelayanan public	6.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	%	87,50
7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	7.1. Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	38,29
	7.2. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	11,30
	7.3. Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	1,00
	7.4. Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	milyar	17,50
8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	8.1. Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	85,00
	8.2. Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	85,00
	8.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	76,90

Anggaran Tahun 2023

Belanja	Rp. 628.996.263.922,00
Belanja Operasi	Rp. 419.090.026.063,00
Belanja Modal	Rp. 94.367.981.102,00
Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.420.669.766
Belanja Transfer	Rp. 114.117.586.991
Surplus/(Defisit)	Rp. (21.403.851.774,00)
Pembiayaan Daerah	Rp. 21.403.851.774,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 21.403.851.774,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,00

Boroko, Januari 2023
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


DEPRI PONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Trans Sulawesi No. 01 Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, Kode Pos 95765


PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Boroko, Maret 2024

INSPEKTUR


SULHA MOKODOMPIS. S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680304 199103 2 018

KATA PENGANTAR

Dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, *Allah swt* atas petunjuk dan bimbingan-Nya semata sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023**, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018–2023 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



SIRAJUDIN LASENA, SE., M.Ec.Dev.
Pj. Bupati Bolaang Mongondow Utara

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja ini menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bontol, 19 Maret 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 4 Misi, 4 Tujuan, 8 Sasaran. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 06 Tahun 2021, maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tergambar pada tabel berikut :

Capaian Kinerja Misi Per Tujuan

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023		Capaian (%)
					Target	Realisasi	
1	Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Point	67.83	68.64	101.19
			Tingkat Kemiskinan	Persen	8.1	7.9	102.47
			Dependency Ratio	Persen	51.51	48.13	106.56

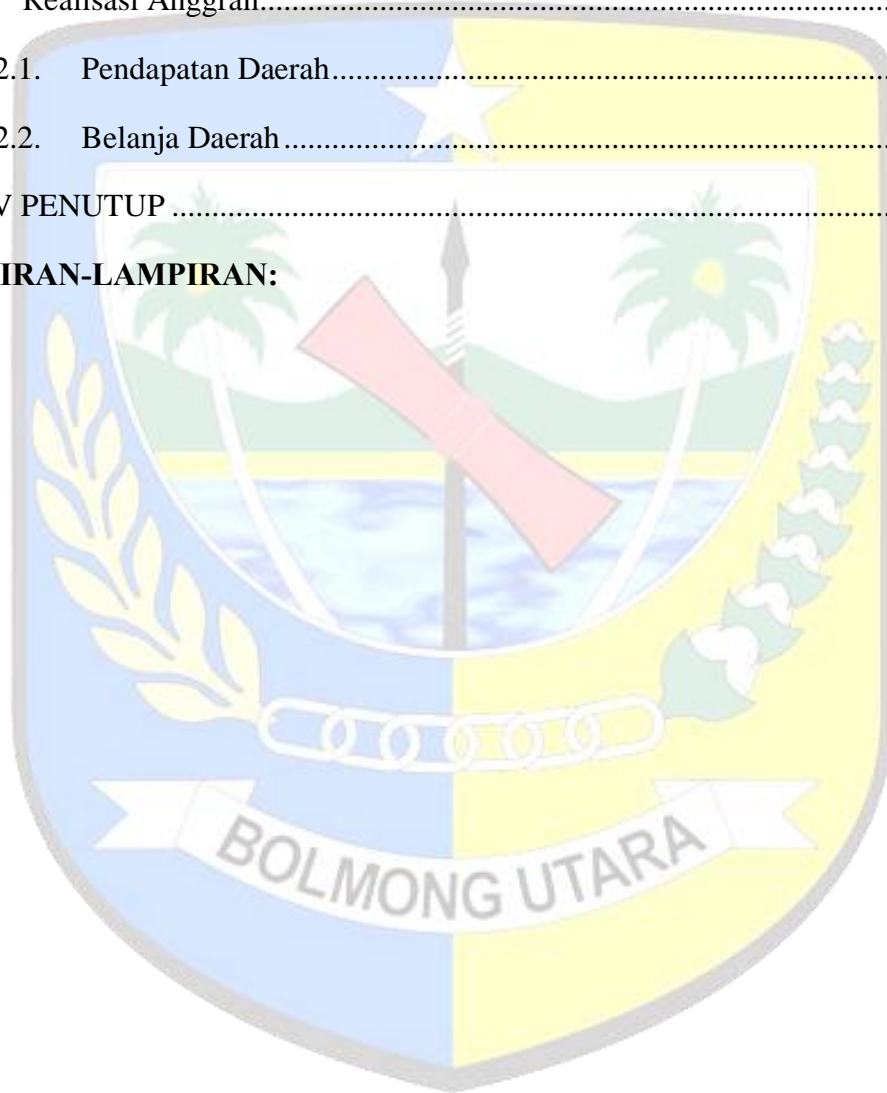
	I	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.94	12.38	103.69	
			2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.55	8.58	100.35	
	II	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.34	73.41	107.42	
	III	Meningktanya Daya Beli Masyarakat	4	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	9.92	9.65	97.30	
			5	Gini Ratio	Point	0.33	0.38	84.85	
	IV	Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.63	4.48	76.58	
			7	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	50.98	74.9	146.92	
2	Memantapkan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good and Clean) Government)		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	61.00	59.99	98.34
	V	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	8	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100.00	
			9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Tinggi	Sedang	97.77	
	VI	Meningkatnya Pelayanan Publik	10	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Nilai	78.50	86.57	110.28	
3	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pertanian, Perikanan dan Pariwisata		Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan		Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK	Persen	5.92	5.43	91.72
	VII	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah / Local	11	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	38.29	34.03	88.87	
			12	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	11.30	10.44	92.39	

				13	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	Persen	1.00	0.78	78.00
				14	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Miliar	17.50	17.5	100.00
4	Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Handal	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		Point	3.88	3.55	91.49
		VIII	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	15	Cakupan Universal Acces	Persen	100.00	86.52	87.52
				16	Persentase kepatuhan terhadap RTRW	Persen	90.00	88.02	97.80
				17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	76.90	80.43	104.59
Rata-Rata Tingkat Capaian								98.78	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2
1.4. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	5
1.5. Organisasi Perangkat Daerah	6
1.6. Isu Strategis (Strategis Issued)	11
1.7. Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2020.....	18
2.1.1. VISI.....	18
2.1.2. MISI	19
2.1.3. TUJUAN	20
2.1.4. SASARAN STRATEGIS.....	22
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	25
2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	28
2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK)	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35

3.1.	Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.1.1.	Analisis Capaian Kinerja.....	41
3.1.2.	Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya.....	111
3.1.3.	Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.	118
3.2.	Realisasi Anggaran.....	123
3.2.1.	Pendapatan Daerah.....	124
3.2.2.	Belanja Daerah.....	126
BAB IV PENUTUP		130
LAMPIRAN-LAMPIRAN:		



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Per Kecamatan Tahun 2018-2023	4
Tabel 1. 2	Susunan Organisasi	11
Tabel 1. 3	Keselarasan Issu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah	14
Tabel 2. 1	Sasarn Strategis Jangka Menengah Tahun 2018-2023.....	22
Tabel 2. 2	Matriks Hubungan Visi, Misi, dan Tujuan.....	23
Tabel 2. 3	Indikator Kinerja Utama 2018-2023	25
Tabel 2. 4	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	28
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 2. 6	Rencana Program dan Anggaran 2023.....	31
Tabel 3. 1	Skala Interval dan Predikat Capaian Kinerja	38
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja	39
Tabel 3. 3	Rangkuman Hasil Capaian Kinerja	41
Tabel 3. 4	Capaian Kinerja Tujuan	42
Tabel 3. 5	Perbandingan IPM antar Kab/Kota dan Prov. Sulut	43
Tabel 3. 6	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	44
Tabel 3. 7	Persentase Kemiskinan di Kab. Bolmut, Prov. Sulut & Nasional Tahun 2018-2022.....	46
Tabel 3. 8	Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kab. Bolmut, Prov. Sulut & Nasional Tahun 2018-2022.....	47
Tabel 3. 9	Capaian Kinerja Tujuan 2	50
Tabel 3. 10	Indeks RB Kab. Bolmut Tahun 2020-2023	51
Tabel 3. 11	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023.....	51
Tabel 3. 12	Capaian Kinerja Tujuan 3	53
Tabel 3. 13	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kab. Bolmut 2021-2023.....	55
Tabel 3. 14	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kab. Bolmut 2021-2023.....	56
Tabel 3. 15	Capaian Kinerja Tujuan 4	58
Tabel 3. 16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kab. Bolmut Tahun 2021	58

Tabel 3. 17 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	60
Tabel 3. 18 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	64
Tabel 3. 19 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2023.....	66
Tabel 3. 20 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2023	68
Tabel 3. 21 Kasus Penyakit Menular	72
Tabel 3. 22 Kasus Penyakit Tidak Menular di Masyarakat Tahun 2019-2023.....	73
Tabel 3. 23 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	74
Tabel 3. 24 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	81
Tabel 3. 25 Kondisi Angkatan Kerja.....	84
Tabel 3. 26 Kondisi Keluarga Sejahtera Kab. Bolmut Beberapa Tahun Terakhir.....	85
Tabel 3. 27 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8	87
Tabel 3. 28 Daftar Perbandingan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antar Kab/Kota Se-Prov Sulut Tahun 2023.....	91
Tabel 3. 29 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6	92
Tabel 3. 30 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7	96
Tabel 3. 31 Peningkatan Produksi Pertanian.....	97
Tabel 3. 32 Peningkatan Produksi Perikanan.....	100
Tabel 3. 33 Kondisi Jalan dan Jembatan.....	104
Tabel 3. 34 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8	105
Tabel 3. 35 Universal Access	105
Tabel 3. 36 Pembangunan dan Pengelolaan Sambungan Rumah Air Minum	106
Tabel 3. 37 Akses air limbah aman	107
Tabel 3. 38 Efisiensi Sumber Daya Biaya	111
Tabel 3. 39 Program yang mendukung Pencapaian tiap Misi, Tujuan, dan Sasaran	119
Tabel 3. 40 Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	124
Tabel 3. 41 Capaian Pendapatan Transfer.....	125
Tabel 3. 42 Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	125
Tabel 3. 43 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung T.A. 2023	127
Tabel 3. 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung T.A. 2023	128
Tabel 3. 45 Realisasi Anggaran BTL dan BL T.A. 2023.....	128
Tabel 3. 46 Proporsi Anggaran BTL dan BL Terhadap Total Belanja Daerah T.A.	



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan	3
Grafik 1. 2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023.....	4
Grafik 3. 1 Defendency Ratio Kab. Bolmut Tahun 2018-2022	48
Grafik 3. 2 Persentase Penduduk Usia Non Produktif dan Usia Produktif di Kab. Bolmut Tahun 2018-2022	49
Grafik 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolmut Tahun 2018-2023	54
Grafik 3. 4 Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran, Kab. Bolmut 2021-2023.....	57
Grafik 3. 5 Perbandingan Capaian RLS dan HLS antara Pemerintah Pusat, Prov. Sulut, dan Kab. Bolmut Tahun 2023.....	61
Grafik 3. 6 Angka Harapan Hidup Kab. Bolmut dari Tahun 2019-2023	64
Grafik 3. 7 Perbandingan Angka Harapan Hidup Antara Pemerintah Pusat, Prov. Sulut, dan Kab. Bolmut Tahun 2023.....	65
Grafik 3. 8 Angka Kematian Bayi dari Tahun 2018-2023.....	66
Grafik 3. 9 Kondisi AKI dan Jumlah Kematian Ibu dari Tahun 2018-2023.....	67
Grafik 3. 10 Prevelensi Stunting	68
Grafik 3. 11 Jumlah Penyakit Menular di Masyarakat Kab. Bolmut Tahun 2023	70
Grafik 3. 12 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kab. Bolmut Lima Tahun Terakhir.....	75
Grafik 3. 13 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Nasional, Provinsi dan Kabupaten	76
Grafik 3. 14 Kondisi Gini Ratio Kab. Bolmut Tahun 2019-2023.....	78
Grafik 3. 15 Perbandingan Kondisi Gini Ratio se-Kab/Kota Prov. Sulut	79
Grafik 3. 16 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka 5 Tahun Terakhir.....	83
Grafik 3. 17 Jumlah Keluarga Sejahtera Tahun 2022	86
Grafik 3. 18 Nilai LPPD Tahun 2018-2021	91
Grafik 3. 19 Perkembangan Nilai IKM.....	94
Grafik 3. 20 Nilai IKM pada UPP.....	94
Grafik 3. 21 Perkembangan Kualitas Lingkungan.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Opini BPK.....	89
Gambar 3. 2 Penyerahan LKPD dan LHP T.A. 2021	89
Gambar 3. 3 Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	104
Gambar 3. 4 Pengukuran Indeks Kualitas Air	109
Gambar 3. 5 Pengukuran Indeks Kualitas Udara	110



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Insatansi Pemerintah, Pelaporan kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja dan reviu kinerja. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyelenggarakan SAKIP tahun 2023 telah menyusun:

- 1) Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
- 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023
- 3) Perjanjian Kinerja (PK) Bupati BolaangMongondow Utara tahun 2023.
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2023

Sedangkan pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana

kinerja tahun 2023 tersebut, akan disajikan dalam buku ini.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
3. Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

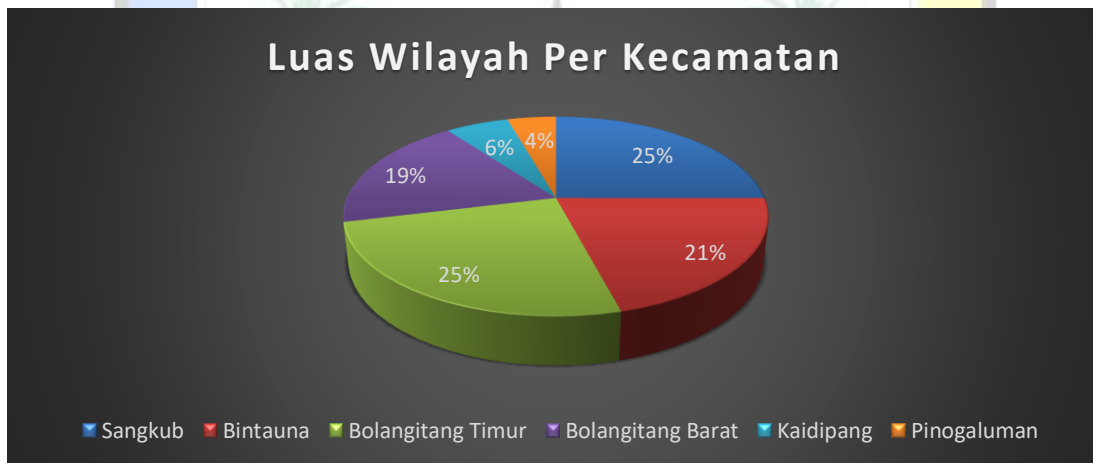
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, letak astronomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo; sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebagai daerah yang terletak

di garis Khatulistiwa, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 107 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah berupa daratan seluas 1.672,61 km². Luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu: Sangkub (418,4 Km²), Bintauna (348,94 Km²), Bolangitang Timur (422,96 Km²), Bolangitang Barat (312,56 Km²), Kaidipang (95,79 Km²) dan Pinogaluman (73,96 Km²).

Grafik 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan



Sumber : *Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2023*

Suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah, maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

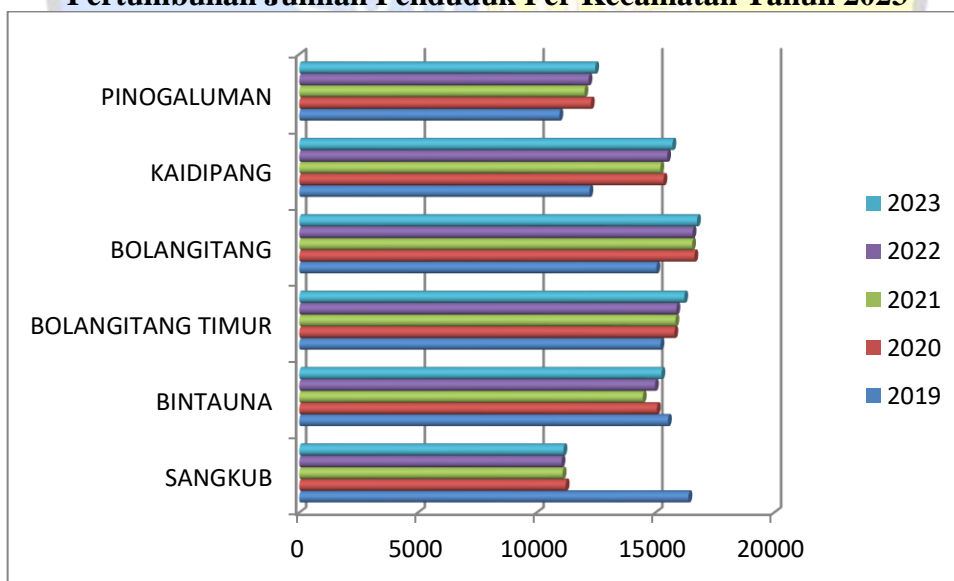
Tabel 1.1
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Per Kecamatan Tahun 2018-2023

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kecamatan Sangkub	16.390	11.220	11.094	11.046	11.127
2.	Kecamatan Bintauna	15.527	15.059	14.969	14.981	15.253
3.	Kecamatan Bolangitang Timur	15.215	15.798	15.843	15.884	16.214
4.	Kecamatan Bolangitang Barat	15.041	16.642	16.546	16.564	16.752
5.	Kecamatan Kaidipang	12.220	15.341	15.207	15.494	15.716
6.	Kecamatan Pinogaluman	10.954	12.280	12.013	12.182	12.464
	JUMLAH	85.347	86.340	85.762	86.151	87.526

Sumber : Kab. Bolmut Dalam Angka 2024

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 terhadap jumlah penduduk sebesar 1,28 %, berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2023 pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan sebesar 1,28% hal ini dikarenakan penyesuaian data dengan satu data Kementerian Dalam Negeri, pada grafik dibawah ini dapat dilihat pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Kecamatan.

Grafik 1.2
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023



Sumber : Kab. Bolmut Dalam Angka 2024

1.4. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Kedudukan

Bupati yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah diwilayah Kabupaten dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Melalui Gubernur. Dalam menjalankan tugas dan wewengannya, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.

B. Kewajiban

Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; dan
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD.

C. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.
 5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1.5. Organisasi Perangkat Daerah

A. Sekretariat Daerah Kabupaten

- *Kedudukan*

Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- *Tugas Pokok*

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- *Fungsi*

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati kota terkait dengan tugas dan fungsinya..

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

- *Kedudukan*

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- *Tugas Pokok*

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- *Fungsi*

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten.

C. Inspektorat Daerah

- *Kedudukan*

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- *Tugas Pokok*

Dinas mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- *Fungsi*

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Dinas Daerah

- *Kedudukan*

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten.

- *Tugas Pokok*

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- *Fungsi*

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

E. Badan Daerah

- *Kedudukan*

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten dan dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- *Tugas Pokok*

Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

- *Fungsi*

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kecamatan

- *Kedudukan*

Kecamatan Dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten.

- *Tugas Pokok*

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

- *Fungsi*

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

G. Struktur Organisasi

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari :

Tabel 1.2
Susunan Organisasi

No.	Susunan Organisasi	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	1
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Inspektorat Daerah	1
4.	Dinas Daerah	21
5.	Badan	4
6.	Kantor	1
7.	Kecamatan	6
	Jumlah Total	35

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Bolmut

1.6. Isu Strategis (*Strategis Issued*)

Perencanaan pembangunan tahun 2023 merupakan tahun kelima dari RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023. Perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023, kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013, hasil evaluasi RKPD tahun 2021 dan pelaksanaan RKPD tahun berjalan, capaian kinerja RPJMD hingga tahun 2021, identifikasi isu strategis, serta permasalahan permasalahan yang mendesak. Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

Dalam rangka mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara holistik, integratif dan spasial, maka disusunlah tema pembangunan tiap tahun sesuai dengan potensi unggulan daerah. Pada tahun 2023, Indikasi Prioritas Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2018–2023

adalah Memantapkan sarana dan prasarana dasar serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah. Dengan tema tersebut, pembangunan lebih diarahkan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan serta menggerakkan ekonomi unggulan daerah dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai nilai budaya Bolaang Mongondow Utara. Pada tahapan ini semua potensi pada kawasan pusat pertumbuhan diharapkan sudah dimanfaatkan secara optimal dan mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat dan daerah.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 telah dilakukan telaah terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi yang berdampak dan harus dipedomani daerah, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraph 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tersebut di atas memiliki makna dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. tema indikatif rencana kerja tahun 2023 adalah: “Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Prioritas.

Berdasarkan tema RKP 2023, prioritas nasional, tema, fokus tematik dan prioritas Provinsi Sulawesi Utara pada RKPD Tahun 2023, serta indikatif tema Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam RPJMD 2018-2023, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 adalah: **“Penguatan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi serta Layanan Dasar yang Berkualitas Untuk Ketahanan Daerah”**. Tema pembangunan tersebut didapat dimaknai sebagai berikut:

1. Penguatan nilai tambah dan daya saing ekonomi adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai pertumbuhan yang ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa masyarakat Bolaang Mongondow Utara juga dapat menikmati kenaikan pendapatan sebagai akibat dari meningkatnya kualitas pengelolaan potensi unggulan daerah (pertanian, perikanan dan pariwisata);

2. Layanan dasar yang berkualitas yaitu pengembangan sektor yang masih menjadi persoalan utama daerah (pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi). Disamping itu, pemantapan sarana dan prasarana dasar juga menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bolaang Mongondow Utara;
3. Ketahanan daerah adalah sebuah kondisi di mana masyarakat Bolaang Mongondow Utara mampu bertahan terhadap dampak ekonomi dan sosial yang di akibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini telah memasuki gelombang ke-4.

Dengan mengangkat tema tersebut dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial yang terdampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat melalui optimalisasi potensi unggulan yang ada di Bolaang Mongondow Utara, dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai budaya masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan peluang tersebut, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdampak Pandemi Covid-19, demikian pula mampu memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi daerah dan masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 yaitu :

1. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta memperkecil kesenjangan;
2. Meningkatkan daya saing produk lokal;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
4. Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi.

Dalam perencanaan pembangunan diperlukan interkoneksi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan, sehingga di dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018–2023 direncanakan adanya sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Bolaang Mongondow Utara. Untuk mewujudkan sasaran daerah tersebut dirumuskan Program Pemerintah Daerah. Penetapan prioritas daerah didasarkan pada isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari :

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Masih rendahnya realisasi investasi dan daya saing produk unggulan lokal;
3. Perlunya peningkatan SDM yang berkualitas;
4. Perlunya transformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Gambaran tentang keselarasan isu strategis, prioritas daerah, dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah

Isu Strategis Daerah (1)	Prioritas Daerah (2)	Sasaran Daerah (3)
Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya daya beli Masyarakat • Menurunnya beban pengeluaran keluarga
Masih rendahnya realisasi investasi dan daya saing produk unggulan lokal	Meningkatkan daya saing produk lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local • Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan

		infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
Perlunya peningkatan SDM yang berkualitas	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat• Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Perlunya transformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik	Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan• Meningkatnya pelayanan publik

1.7. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 1 (satu) tahun anggaran. Mengukur keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja organisasi diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya capaian pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada tahun berkenaan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana sistematika penyusunan LKIP dibawah ini:

Surat Keputusan Penyusunan LKIP

Surat Pernyataan Reviu

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I - Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II - Perencanaan Kinerja,

Menjelaskan secara ringkas perencanaan strategis dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

Bab III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV - Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran:



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu tertentu yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan program kepala daerah. Hal ini diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2023 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Secara garis besar perencanaan kinerja jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut :

2.1.1. VISI

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah:

***"Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan,
Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing."***

Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

1. *Berkelanjutan* memiliki makna bahwa, apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah

tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. *Mandiri*, menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah disekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Kawasan agri bisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) Pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. *Berbudaya* memiliki makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang dinamis dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi;
4. *Berdaya Saing* memiliki makna bahwa, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. MISI

Dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan sebagai kata kunci keberhasilan, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;

4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

2.1.3. TUJUAN

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia : Tujuan pembangunan pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan penjabaran dari Misi I yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya. Secara umum beberapa catatan terhadap Misi I Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menjadi pertimbangan dalam penentuan rekonstruksi perubahan adalah Pembangunan Manusia yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia mencapai kinerja yang sangat baik dengan capaian diatas 100 persen. Capaian tersebut tidak mengindikasikan capaian yang sangat baik kinerja Pemkab Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara penuh, hal yang perlu menjadi perhatian adalah lemahnya penetapan target IPM sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 telah terlampaui. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masih menempatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Kinerja Utama dari tujuan pertama.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani : Tujuan pembangunan selanjutnya berorientasi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang merupakan mandatori dari Misi 2 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Misi 2 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 fokus terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pelayanan publik. Evaluasi pembangunan RPJMD setelah

perubahan adalah kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang berada pada angka 59,99 poin pada tahun 2020 dengan kategori Cukup.

3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan : Tujuan 3 Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang merupakan mandatori dari Misi 3. Beberapa catatan penting dari kinerja sebelum Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 ialah capaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mampu tumbuh menjadi 5,43 persen pada tahun 2023, sudah lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mengalami kontraksi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Tujuan 3 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan menjadikan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) sebagai Indikator Kinerja Utama atau representasi kinerja Tujuan 3.
4. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan : Tujuan pembangunan selanjutnya berorientasi terhadap peningkatan cakupan infrastruktur dan penataan ruang yang merupakan mandatori dari Misi 4 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Misi 4 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 fokus terhadap peningkatan infrastruktur dasar, sosial-ekonomi dan pelayanan publik. Beberapa catatan penting tujuan 4 terhadap evaluasi pembangunan RPJMD setelah perubahan adalah kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang berada pada angka 3,55 poin pada tahun 2021 dengan kategori Sedang. Kualitas lingkungan menjadi syarat mutlak yang terus dipertahankan dan ditingkatkan sejalan pembangunan infrastruktur. Sedangkan dari aspek kuantitas sampai dengan tahun 2023 tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur terhadap rencana tata ruang ditargetkan sesuai dengan arahan indikasi program Utama.

2.1.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ditetapkan untuk dapat mengukur pencapaian tujuan, dimana sasaran strategis dapat menunjukkan ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat;
4.	Menurunnya beban pengeluaran keluarga;
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
6.	Meningkatnya pelayanan public;
7.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local; dan
8.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 dirincikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Matriks Hubungan Visi, Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2023
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,88	11,90	11,91	11,92	11,93	11,94	11,94
			2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,11	8,12	8,40	8,46	8,50	8,55	8,55
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup	Tahun	67,21	67,54	67,66	67,99	68,22	68,34	68,34
		Meningkatnya daya beli masyarakat	4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta/rupiah	8,99	9,06	9,36	9,66	9,85	9,92	9,92
			5. Gini Ratio	Poin	0,39	0,38	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33
		Menurunnya beban pengeluaran keluarga	6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,08	4,62	4,50	4,04	3,75	3,63	3,63
			7. Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	37,01	39,74	41,94	50,74	50,94	50,98	50,98
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government)	Mengahdirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	8. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			9. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
		Meningkatnya Pelayanan Publik	10. Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	Persen	70,42	72,08	73,20	76,39	77,40	78,50	78,50

LKJIP TAHUN 2023

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Meningkatkan Daya Saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	11. Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	29,14	30,97	32,80	34,63	36,46	38,29	38,29
			12. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	8,60	9,14	9,68	10,22	10,76	11,30	11,30
			13. Kontribusi sub sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (sektor jasa lainnya)	Persen	0,68	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00
			14. Realisasi Investasi	Milyar	10,43	14,61	7,88	12,00	15,00	17,50	17,50
Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	15. <i>Cakupan Universal</i>	Persen	67,85	74,28	80,71	87,14	93,57	100,00	100,00
			16. Persentase kepatuhan terhadap RTRW	Persen	79,38	83,00	86,00	89,00	90,00	90,00	90,00
			17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	N/A	76,31	79,97	73,01	75,04	76,90	76,90

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan saran/arahan serta coaching clinic dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dan Tim) bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diringkas, dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga indikator kinerja sasaran semula berjumlah 23 indikator kinerja utama menjadi 17 indikator kinerja utama (ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	➤ Formulasi pengukuran : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal	Dikbud
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	
	1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)	➤ Formulasi pengukuran : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas	Dikbud
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)	➤ Formulasi pengukuran : Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bias menulis : Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100	Dinkes
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	

3. Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Dayabeli)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Rata-rata pengeluaran perkapita per tahun pada tahun t : IHK tahun t x 100 ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Bapelitbang
	3.2 Gini Ratio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah G 0,3 < G < 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Bapelitbang
4. Menurunnya beban pengeluaran keluarga	4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulas pengukuran Jumlah Pengangguran : Angkatan Kerja x 100% ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Disnaker
	4.2 Persentase Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulas pengukuran : $\frac{\text{(KS III + KS III Plus)}}{\text{(Total KS I s.d. KS III Plus)}} \times 100\%$ ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	BPKD
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	5.1 Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	BPKD
	5.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : 1.00 - 1.80 = Sangat Rendah 1.81 - 2.60 = Rendah 2.61 - 3.40 = Sedang 3.41 - 4.20 = Tinggi 4.21 - 5.00 = Sangat Tinggi ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Setda
6. Meningkatnya pelayanan publik	6.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Rata-rata IKM (Jumlah SKPD yang dinilai) x 100% ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Setda

7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	7.1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	➤ Formulasi pengukuran : PDRB sector pertanian : Total PDRB x 100%	Distan
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	
	7.2 Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	➤ Formulasi pengukuran : PDRB sub sector perikanan : Total PDRB x 100%	DKP
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	
	7.3 Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	➤ Formulasi pengukuran : PDRB sub sector kesenian, hiburan dan rekreasi : Total PDRB sector jasa lainnya x 100%	Dispar
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	
	7.4 Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	➤ Formulasi pengukuran : Jumlah Nilai Investasi	DPMPSTP
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	
8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	8.1 Cakupan <i>Universal Acces</i>	➤ Formulasi pengukuran : ((%Cakupan akses terhadap air bersih + (100-% kawasan kumuh) + %Cakupan akses terhadap sanitasi)) : 3 x 100%	PUPR
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	
	8.2 Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	➤ Formulasi Pengukuran : Jumlah pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai rekomendasi : Jumlah rekomendasi yang diterbitkan x 100%	PUPR
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	
	8.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	➤ Formulasi pengukuran : $IKLH = (IPA+IPU+ITH)/3$ IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan	DLHK
		➤ Tipe Perhitungan : Absolut	

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Upaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya, maka sistem akuntabilitas disusun dengan cara dikembangkannya Sistem AKIP (SAKIP). Salah satu unsur yang ada dalam SAKIP adalah perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun dan akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mengukur keberhasilan / kegagalan atas pertanggung jawaban yang telah ditetapkan oleh suatu instansi. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan RPJMD, dapat kami sajikan dibawah ini :

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,94
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	8,55
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	68,34
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Jt/Rp.	9,92
		5	Gini Ratio	Poin	0.33
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,63
		7	Persentase Keluarga Sejahtera	%	50,98
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	8	Opini BPK	Predikat	WTP
		9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Tinggi
6	Meningkatnya pelayanan public	10	Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	78.,50

7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	11	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	38,29
		12	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	11,30
		13	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	1,00
		14	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Milyar	17,50
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	15	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	100,00
		16	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	90,00
		17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	76,90

2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan komitmen dan janji untuk melaksanakan dan mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selengkapnya dapat kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,94
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	8,55
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	68,34
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Jt/Rp.	9,92
		5	Gini Ratio	Poin	0.33
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,63
		7	Persentase Keluarga Sejahtera	%	50,98
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	8	Opini BPK	Predikat	WTP
		9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Tinggi

6	Meningkatnya pelayanan public	10	Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	78,50
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	11	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	38,29
		12	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	11,30
		13	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor	%	1,00
		14	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Milyar	17,50
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	15	Cakupan Universal Acces	%	100,00
		16	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	90,00
		17	Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH)	%	76,90

- Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 sebesar **Rp. 676.167.166.947,10**
- Rencana belanja langsung sebesar **Rp 304.009.817.486,10**
- Rencana belanja tidak langsung sebesar **Rp. 372.157.349,461**

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah;
 - 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah;
- dan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membuat penetapan kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun, sebagaimana sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023.

Tabel 2.6
Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)
	ANGGARAN
BELANJA DAERAH	676.167.166.947,10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	351.274.183.291,10
PENDIDIKAN	141.148.314.298,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.384.213.093,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	422.129.728,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.043.592.562,00
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	114.099.715,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	184.279.200,00
KESEHATAN	130.416.297.637,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.395.675.985,90
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.325.401.107,20
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.252.939.705,90
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	37.999.803,10
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	404.281.035,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.135.977.762,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.469.213.431,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.871.849.847,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.619.575.371,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	115.600.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	215.580.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	575.169.446,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	515.505.540,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	642.284.032,00
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	307.780.500,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	46.961.976.795,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	420.502.200,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	420.940.600,00
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.249.225.073,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.698.433.974,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	310.521.104,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.917.617.670,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	103.286.630,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	219.365.695,00
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.270.766.009,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.942.055.405,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.853.622.320,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	475.088.284,00
SOSIAL	7.053.602.512,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.709.957.173,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	113.661.350,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	342.920.478,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	182.341.020,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	654.794.055,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	49.928.436,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44.692.671.080,00
TENAGA KERJA	2.424.557.033,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.954.406.881,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	49.999.910,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	294.436.800,00
PANGAN	2.846.784.436,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.099.764.136,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	384.988.884,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	265.638.656,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	96.392.760,00
LINGKUNGAN HIDUP	5.827.219.301,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.794.220.161,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	129.697.154,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	407.448.577,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	149.707.536,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	51.338.300,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.284.738.016,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.234.478.672,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.757.263.672,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	477.215.000,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.875.867.616,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.737.140.298,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	466.661.912,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	672.065.406,00
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.055.406.482,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.393.608.214,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	340.406.065,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	572.781.860,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	61.304.690,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.880.302.905,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.049.040.800,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	119.603.700,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	638.358.248,00
PERHUBUNGAN	3.228.815.694,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.501.402.298,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	727.413.396,00
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	4.350.501.590,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.187.711.255,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	19.990.983,00
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.081.937.232,00
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.060.862.120,00
PENANAMAN MODAL	3.483.154.263,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.612.318.191,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	159.900.400,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.023.720,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	123.229.687,00
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	438.199.465,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	99.482.800,00

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.050.018.017,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.084.449.255,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	840.802.091,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.124.766.671,00
KEARSIPAN	2.315.867.976,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.262.901.976,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	17.083.600,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	26.882.400,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	9.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38.410.764.509,00
KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.172.644.991,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.691.748.655,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.377.614.215,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.103.282.121,00
PARIWISATA	3.900.469.516,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.755.035.643,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	248.115.679,00
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	897.318.194,00
PERTANIAN	25.039.761.960,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.492.816.956,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.120.338.165,00
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.077.294.180,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	607.618.775,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	190.699.060,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	550.994.824,00
PERDAGANGAN	4.297.888.042,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.476.667.369,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	28.035.666,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	129.196.000,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	259.382.480,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	12.000.000,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.343.488,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	15.000.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	357.263.039,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	66.873.406.631,00
SEKRETARIAT DAERAH	40.213.802.177,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.185.107.222,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.078.119.710,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	950.575.245,00
SEKRETARIAT DPRD	26.659.604.454,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.461.812.703,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.197.791.751,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	148.178.184.523,00
PERENCANAAN	6.511.788.188,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.883.682.622,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.224.496.093,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	789.085.581,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	614.523.892,00
KEUANGAN	133.835.069.171,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.656.651.506,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	119.789.780.727,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	796.190.912,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	592.446.026,00
KEPEGAWAIAN	7.831.327.164,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.722.713.003,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	935.409.048,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.173.205.113,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.192.167.136,00
INSPEKTORAT	6.192.167.136,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.418.111.695,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.379.994.810,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	394.060.631,00
UNSUR KEWILAYAHAN	13.448.257.369,00
KECAMATAN	13.448.257.369,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.248.649.904,00

LKJIP TAHUN 2023
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.607.465,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.097.532.408,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.097.532.408,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.140.352.391,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	59.957.489,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.897.222.528,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Azas penyelenggaraan negara telah banyak berubah, terutama sistem manajemen pemerintahan di Indonesia saat ini, dimana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengarahkan setiap pemerintah daerah menganut azas akuntabilitas kinerja.

Makna azas akuntabilitas inilah yang telah merubah paradigma manajemen pemerintahan selama ini yang hanya berfokus kepada akuntabilitas keuangan saja, yaitu pertanggungjawaban instansi pemerintah cukup dengan menyajikan informasi realisasi anggaran yang telah dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan melalui audit pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Oleh sebab itu evaluasi kinerja dan evaluasi efisiensi keuangan sudah pada tingkatan penilaian laporan kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB.RI)

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian terhadap target memperhatikan karakteristik komponen realisasi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Bab ini akan disajikan uraian analisis pencapaian kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program-program yang mendukung persasaran, realisasi anggaran persasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja. Adapun skala interval dan predikat capaian kinerja ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Skala interval dan Predikat Capaian Kinerja

Nomor	Bobot Capaian	Predikat
1	2	3
1.	> 95 %	Sangat Berhasil
2.	80 - 95 %	Berhasil
3.	50 - < 80 %	Cukup Berhasil
4.	< 50 %	Kurang Berhasil

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 dapat melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD tahun 2018-2023 melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupten Bolaang Mongondow Utara melalui 4 tujuan dan

8 sasaran sebesar **98,78%** atau kategori capaian kinerja “**Sangat Berhasil**” yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian tujuan dan sasaran. Berikut ini diuraikan hasil pengukuran dan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja

No.	Misi	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	2023		Capaian (%)
							Target	Realisasi	
1	Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia		Point	67.83	68.64	101.19
				Tingkat Kemiskinan		Persen	8.1	7.9	102.47
				Dependency Ratio		Persen	51.51	48.13	106.56
		I	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.94	12.38	103.69
				2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.55	8.58	100.35
		II	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.34	73.41	107.42
		III	Meningktanya Daya Beli Masyarakat	4	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	9.92	9.65	97.30
				5	Gini Ratio	Point	0.33	0.38	84.85
		IV	Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.63	4.48	76.58
				7	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	50.98	74.9	146.92
2	Memantapkan tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good and Clean) Government)	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi		Point	61.00	59.99	98.34
		V	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	8	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100.00
				9	Kinerja Penyekenggaraan	Predikat	Tinggi	Sedang	97.77

				Pemerintahan Daerah					
		VI	Meningkatnya Pelayanan Publik	10	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Nilai	78.50	86.57	110.28
3	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan			Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK	Persen	5.92	5.43	91.72
		VII	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah / Local	11	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	38.29	34.03	88.87
				12	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persen	11.30	10.44	92.39
				13	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	Persen	1.00	0.78	78.00
				14	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Milyar	17.50	17.5	100.00
4	Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Handal	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Point	3.88	3.55	91.49
		VIII	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	15	Cakupan Universal Acces	Persen	100.00	86.52	87.52
				16	Persentase kepatuhan terhadap RTRW	Persen	90.00	88.02	97.80
				17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	76.90	80.43	104.59
Rata-Rata Tingkat Capaian									98.78

Rangkuman Hasil analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis tahun 2023 dapat kami uraikan dalam table di bawah ini:

Tabel 3. 3
Rangkuman Hasil Capaian Kinerja

No	Kategori Capaian	Jumlah Tujuan	Jumlah Indikator	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator	Hasil Analisis capaian kinerja indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Sangat Berhasil	2	4	6	11	Kinerja sangat berhasil, efektif, efisien, inovatif dan bermanfaat.
2	Berhasil	2	2	2	4	Kinerja berhasil, sesuai harapan, sedikit perbaikan, berorientasi kinerja.
3	Cukup Berhasil	0	0	0	2	Kinerja cukup berhasil, perlu banyak perbaikan dan peningkatan kinerja, perlu konsistensi target dan integritas data, perlu diperjelas hasil yang akan
4	Kurang Berhasil	0	0	0	0	Kinerja kurang berhasil, perlu banyak perbaikan yang mendasar, kurangnya keterkaitan antara program/kegiatan dgn sasaran, perlu penajaman indikator outcome/output kegiatan
5	Tidak Ada Informasi (n.a)	0	0	0	0	Kinerja Belum dilakukan pengukuran
Jumlah		4	6	8	17	

Berdasarkan table analisis di atas, pada capaian tujuan terdapat 2 tujuan dan 4 indikator dalam kategori sangat berhasil dan 2 tujuan dan 2 indikator dalam kategori sangat berhasil sedangkan pada capaian sasaran terdapat 6 sasaran dan 11 indikator dalam kategori sangat berhasil, 2 sasaran dan 4 indikator berada pada kategori berhasil, serta 2 indikator masuk kategori cukup berhasil.

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai diatas, analisis dilakukan terhadap realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Penjelasan-penjelasan mengenai komponen operasionalisasi kinerja, mengenai keberhasilan dan kegagalan serta upaya-upaya yang dilakukan dan harapan kedepan untuk peningkatan kinerja. Dibawah ini kami uraikan hasil analisis dan evaluasi tingkat capaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 setelah dilakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dituangkan dalam skala ordinal dengan diinterpretasikan dalam pernyataan capaian, sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya diukur dari pencapaian tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Defendency Ratio. Tingkat capaian ketiga tujuan tersebut pada tahun 2023 mencapai **103,40%** dengan rincian target, realisasi dan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan 1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68.06	67.83	68.64	101.19	67.83	101.19
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	7.31	8.10	7.90	102.46	8.10	102.46
3	Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio)	Persen	48.13	51.51	48.13	106.56	51.51	106.56
Rata-rata capaian Tujuan 1						103.40		

1. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and

healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan kriteria UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a) Rendah (< 60)
- b) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d) Sangat Tinggi (> 80).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 ditargetkan 67,83 terealisasi 68,64 dengan **tingkat capaian 101,19%**. Dengan demikian kualitas hidup manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tergolong kategori sedang.

Tabel 3.5
Perbandingan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 – 2023

Wilayah Administratif	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bolaang Mongondow	69.62	68.95	68.16	67.89	67.82	66.91
Minahasa	76.96	76.18	75.73	75.29	75.47	74.97
Sangihe	72.22	71.63	71.07	70.73	70.53	69.67
Talaud	71.14	70.43	69.83	69.4	68.97	68.32
Minahasa Selatan	73.66	72.89	72.32	72.11	71.68	70.86
Minahasa Utara	75.31	74.69	74.11	73.9	73.95	73.05
Bolaang Mongondow Utara	68.64	68.06	67.39	66.99	66.91	66.32
Sitaro	69.57	68.94	68.05	67.64	67.48	66.75
Minahasa Tenggara	71.93	71.48	71.06	70.51	70.47	69.66
Bolaang Mongondow Selatan	66.4	65.9	65.42	65	65.28	64.49
Bolaang Mogondow Timur	67.95	67.21	66.55	65.99	68.08	65.21
Manado	80.14	79.66	79.2	78.93	79.12	78.41
Bitung	75.11	74.7	74.2	74.1	74.2	73.27
Tomohon	78.1	77.44	76.86	76.69	76.67	75.78
Kotamobagu	74.43	73.96	73.47	72.97	73.22	72.55
Sulawesi Utara	74.36	73.81	73.3	72.93	72.99	72.2

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,58 point dari tahun 2022 dan 2,32 point dari tahun 2018 (tahun pertama RPJMD). Namun demikian berdasarkan tabel diatas terlihat bahwan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 masih dibawah IPM Provinsi Sulawesi Utara. Adapun secara

peringkat provinsi IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 berada pada peringkat 13 dari 15 kabupaten/kota.

Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Tabel 3.6
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	67,54	67,66	67,73	68,05	68,33
2	Pendidikan :					
	a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,12	8,40	8,41	8,57	8,58
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,90	11,91	12,17	12,34	12,38
3	Pengeluaran Perkapita Per tahun (d disesuaikan)	9.366	9.062	9.143	9.285	9.652
	Indeks Pembangunan Manusia	66,91	66,99	67,39	68,06	68,64

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Indikator Kesehatan yakni Umur Harapan Hidup (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat dari 68,05 tahun pada tahun 2022 menjadi 68,33 pada tahun 2023 namun masih berada pada peringkat ke 14 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,57 tahun pada tahun 2022 menjadi 8,58 tahun pada tahun 2023, berada pada peringkat ke 12 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, mengalami penurunan dari peringkat ke 11 pada tahun 2022.

Harapan Lama Sekolah meningkat dari 12,34 tahun pada tahun 2022 meningkat menjadi 12,38 tahun pada tahun 2023, namun masih berada pada peringkat ke 11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pengeluaran perkapita riil meningkat dari Rp. 9,285 juta pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 9,652 juta pada tahun 2023, namun masih ada pada peringkat ke 12 dari 15 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara.

Dari keempat indikator pembentuk IPM, indikator Usia Harapan Hidup yang masih tergolong paling rendah dan berada di peringkat ke 14 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup selama beberapa tahun terakhir

terus dilaksanakan dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas. Disamping itu untuk mengantisipasi kekurangan tenaga dokter, pemerintah daerah menggunakan jasa dokter spesialis dengan status kontrak kerja walaupun dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Kebijakan terkait dengan penyiapan tenaga dokter untuk kebutuhan kedepan, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan bantuan studi kepada putra putri daerah yang melanjutkan pada fakultas kedokteran.

Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan proporsi yang memadai sesuai dengan mandatory spending urusan Pendidikan.

Indikator Pengeluaran Per Kapita per tahun yang disesuaikan dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat, sudah melewati angka yang dicapai pada tahun 2019 sebelum pandemi. Meningkatnya Kembali pengeluaran per kapita pada tahun 2023 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kini tengah menuju kearah yang lebih baik.

2. Tingkat Kemiskinan.

Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda

pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 ditargetkan dapat ditekan pada angka 8,10%, realisasi 7,90% dengan **tingkat capaian 102,46%**.

Tabel 3.7
Persentase Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2018 – 2023

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kab. Bolaang Mongondow Utara	8,64	8,45	8,41	8,03	7,31	7,90
2	Provinsi Sulawesi Utara	7,80	7,66	7,62	7,77	7,28	7,38
3	Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 sebesar 7,90% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 7,28%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih di atas angka provinsi namun dibawah angka nasional. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar 7,38% sedangkan nasional sebesar 9,36%. Walaupun demikian dalam peringkat provinsi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada peringkat 9 dari 15 Kabupaten/Kota.

Pemetaan kemiskinan tidak hanya pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga dilakukan pengukuran. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Makin tinggi angkanya menunjukkan makin parah kemiskinannya. Tabel berikut menggambarkan tingkat

kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2023:

Tabel 3.8
Tingkat Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Provinsi Sulawesi Utara 2018 – 2023

No	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1,15	1,32	0,83	1,18	0,90	0,81
2	Provinsi Sulawesi Utara	1,27	1,18	1,14	1,24	1,15	1,09
No	Tingkat Keparahannya Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,24	0,34	0,14	0,26	0,17	0,14
2	Provinsi Sulawesi Utara	0,30	0,25	0,25	0,28	0,26	0,26

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

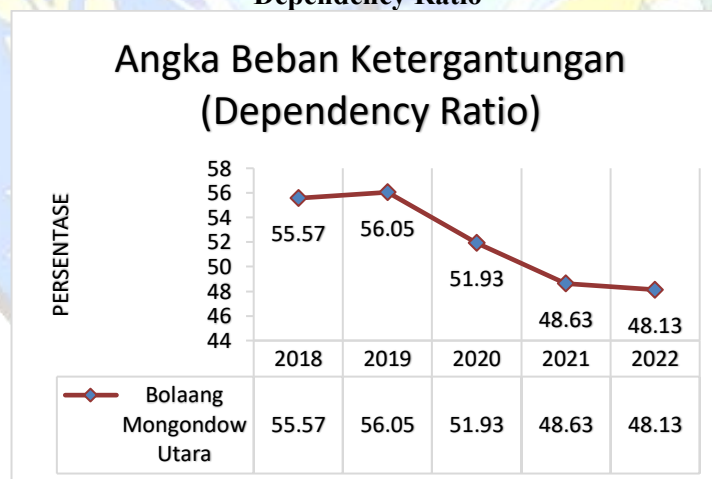
Dengan meningkatnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023, namun tidak demikian dengan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan yang mengalami penurunan. Tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 yakni 0,81% mengalami penurunan 0,9% dari tahun 2022. Tingkat kedalaman kemiskinan tersebut masih dibawah tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 yang mencapai 1,09%. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 yakni 0,14% mengalami penurunan 0,07% dari tahun 2022. Tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 masih dibawah tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2023 yang mencapai 0,26%. Tingkat kedalaman kemiskinan tersebut diatas menggambarkan bahwa perbedaan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat pada garis kemiskinan. Demikian juga dengan tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk termiskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat dengan angka rata-rata pengeluaran kelompok penduduk miskin.

3. Dependency Ratio

Dependency Ratio atau rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ini menghitung jumlah penduduk non produktif dan membaginya dengan jumlah penduduk produktif. Dari hasil perhitungan ini, didapatkan berapa jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif.

Indikator yang kerap disebut sebagai *Dependency Ratio* ini berguna untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Jika suatu daerah memiliki angka ketergantungan yang tinggi, maka potensi pertumbuhan ekonominya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan, jika *dependency ratio* suatu wilayah tergolong rendah, maka potensi pertumbuhannya besar karena banyak terdapat masyarakat usia produktif. Dependency ratio atau rasio ketergantungan tahun 2023 dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditargetkan 51,51% terealisasi 48,13% (masih menggunakan angka tahun 2022) atau **tingkat capaian 106,56%**.

Grafik 3.1
Dependency Ratio

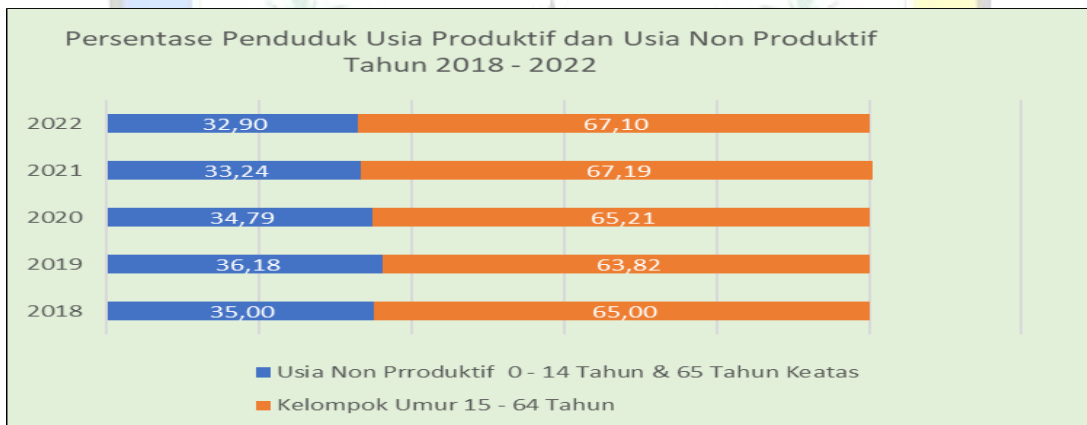


Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)

Rasio ketergantungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat ideal dan merupakan bonus demografi yang sedang terjadi. Ini menggambarkan suksesnya kinerja bidang kesehatan dan pengendalian penduduk melalui keluarga berencana sehingga dampak yang terjadi adalah penurunan proporsi jumlah penduduk usia <15 tahun makin kecil karena

penurunan fertilitas, peningkatan jumlah anak keusia dewasa karena penurunan angka kematian bayi dan terjadi ledakan penduduk usia kerja. Kondisi ini disebut *Window of Opportunity* berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan antara jumlah penduduk produktif dengan yang non produktif. Dengan kata lain pada saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas demi meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Grafik 3.2
Persentase Penduduk Usia Non Produktif dan Usia Produktif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase penduduk usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun dan usia 65 tahun keatas cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 sebesar 35,00%, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 32,90%, sedangkan persentase penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar 65% meningkat menjadi 67,10% pada tahun 2022.

Tujuan 2. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good and Clean Government)

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 – 2023 ditetapkan misi kedua yakni Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good and Clean Government). Tujuan yang hendak dicapai untuk

mewujudkan misi tersebut adalah Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang mongondow Utara ditargetkan 61,00 point pada tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB melalui surat nomor B/563/RB.06/2024 tanggal 01 Februari 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah **59,99** atau kategori “CC”, dengan tingkat capaian dari target adalah **98,34%**.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tujuan 2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	48.70	61.00	59.99	98.34	61.00	98.34
Rata-rata capaian						98.34		

Realisasi pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,29 point dari tahun 2022 dan 28,06 point dari tahun 2020 (tahun pertama Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh). Dari Tabel 2, terlihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan pada 4 tahun terakhir. Indeks Reformasi Birokrasi Bolaang Mongondow Utara mendapatkan nilai 31,93 pada tahun 2020, mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan nilai 40,03 dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan nilai 48,70 kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan nilai 59,99.

Tabel 3.10
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2020 - 2023

NO	TAHUN	NILAI	PREDIKAT	INTERPRETASI
1	2020	31,93	C	BURUK
2	2021	40,03	C	BURUK
3	2022	48,70	C	BURUK
4	2023	59,99	CC	CUKUP

Sumber Data : LHE Kementerian PAN-RB Tahun 2020-2023

Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan Mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Berdasarkan komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Komponen RB General memperoleh nilai 55,09 dan Komponen RB Tematik memperoleh nilai 4,90. Hasil penilaian masing-masing komponen seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100,00	55,09
B.	RB Tematik	20,00	4,90
C.	Indeks Reformasi Birokrasi	120,00	59,99

Sumber Data : LHE Kementerian PAN-RB Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dinyatakan bahwa, hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis,

komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. namun terdapat beberapa catatan untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Dalam Hal Reformasi Birokrasi General :

- a. Dari 21 kegiatan utama masih terdapat 2 kegiatan utama yang perlu mendapat perhatian khusus karena belum mendapatkan nilai, kegiatan utama yang dimaksud ialah “Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik” dengan indikator kegiatan “Indeks Kualitas Kebijakan” dan kegiatan utama “Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional” dengan indikator kegiatan “Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”;
- b. Dari segi penilaian Rencana Aksi Pembangunan RB Genral mendapat skor 1,63 dari bobot nilai 3, dengan catatan terdapat target Kegiatan Utama yang belum didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023) sehingga perlu ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi dari Kemen PANRB yaitu dengan Menetapkan target atas Kegiatan Utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023);
- c. Rencana aksi reformasi birokrasi telah disusun, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal. Selain itu, rencana aksi Reformasi Birokrasi level Pemda yang sudah ada belum dijadikan pedoman sebagai penyusunan rencana aksi di level Perangkat Daerah.

2. Dalam hal Reformasi Birokrasi Tematik;

- a. RB Tematik merupakan strategi baru dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map RB 2020–2024. Ditetapkan lima (5) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu: (1) Pengentasan Kemiskinan, (2) Peningkatan Investasi, (3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, (4) Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN), (5) Pengendalian Inflasi. Dari 5 tema tersebut masing-masing dinilai dan mendapatkan nilai tetapi masih terdapat 2 tema yang belum mendapatkan

nilai capaian, 2 tema yang dimaksud ialah tema “Peningkatan Investasi” dan tema “Pengendalian Inflasi”.

- a. Dari segi penilaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik secara keseluruhan berdasarkan lima (5) tema pelaksanaan RB Tematik hanya mendapatkan skor 0,12 dari bobot nilai 5, dikarenakan dokumen rencana aksi yang dilaporkan hanya berfokus pada tema pengentasan kemiskinan sehingga pada hasil penilaian oleh Kemen PANRB, rencana aksi untuk 4 tema yang lain tidak mendapatkan nilai. Berdasarkan hal tersebut maka ke depan perlu ditindaklanjuti dengan Menyusun Rencana Aksi terhadap lima (5) tema pelaksanaan RB Tematik dengan memperhatikan target pada baseline tahun sebelumnya dan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023);

Tujuan 3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkeadilan

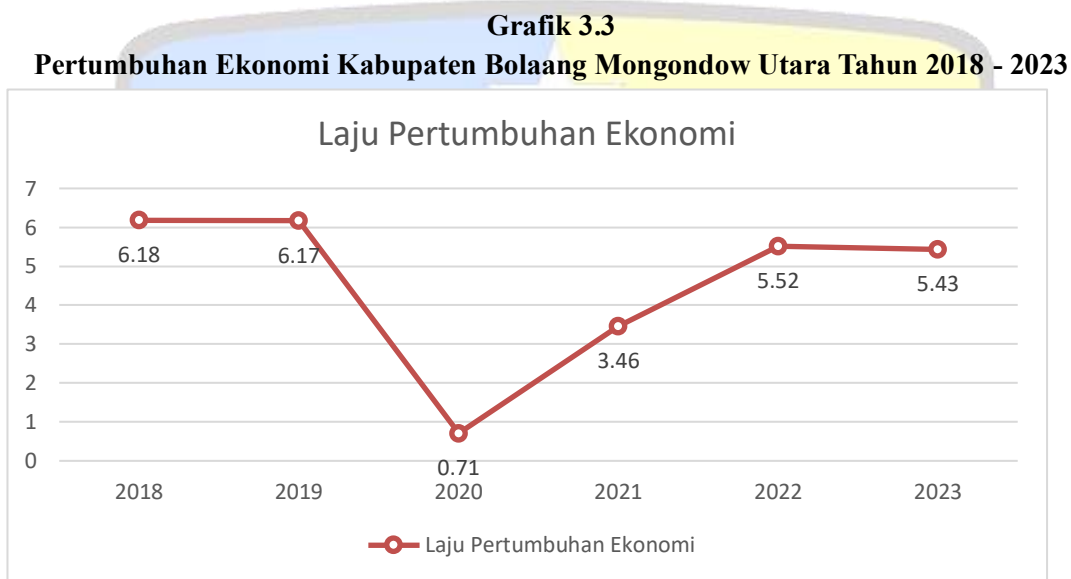
Misi ketiga RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 – 2023 yakni Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Perikanan dan Pariwisata. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan misi tersebut adalah Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkeadilan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 ditetapkan sebesar 5,92% terealisasi 5,43% atau **tingkat capaian 91,72%**.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Tujuan 3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	Persen	5.52	5.92	5.43	91.72	5.92	91.72
Rata-rata capaian						91.72		

Pertumbuhan ekonomi yang digambarkan pada tabel diatas dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meningkat sebesar 5,43%, dapat tumbuh lebih cepat setelah terpuruk pada angka 0,71% ditahun 2020. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir digambarkan sebagai berikut:



Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 (diolah)

Grafik diatas menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sempat mengalami perlambatan pertumbuhan hingga pada angka 0,17% pada awal masa pandemi Covid 19 tahun 2020 kembali mulai membaik. Kebijakan pembatasan sosial yang dilaksanakan pada masa pandemi sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini turut juga dipengaruhi oleh adanya oleh kebijakan belanja tahun 2021 yakni adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak Covid 19. Sebagian belanja daerah yang dialokasikan untuk faktor-faktor produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi harus direalokasi untuk penanganan dampak pandemi.

Secara total, PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga Berlaku pada tahun 2023 sebesar 3,26 triliun rupiah. Jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010 PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah

sebesar 1,94 triliun rupiah. Sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung meningkat, perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara periode 2018 – 2019 tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan dan kembali mengalami percepatan pertumbuhan di tahun 2022. Perekonomian Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2021 dan 2023 berturut – turut tumbuh sebesar 3,46 dan 5,43 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki kontribusi hampir setengah dari total PDRB Bolaang Mongondow Utara. Dari sisi permintaan akhir, sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang sekitar separuh total PDRB.

Pada periode tahun 2021 – 2023 PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 2,72 triliun Rupiah pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 3,26 triliun rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada periode 2021-2023 dapat dilihat dari table 11 berikut ini:

Tabel 3.13
PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2021-2023

Komponen PDRB Menurut Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)		
	2023	2022	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1565082	1445182.59	1316330.1
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	53147.24	44849.32	40999.23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	589521.11	565215.19	532514.77
Pembentukan Modal Tetap Bruto	874303.62	798534.46	736145.63
Perubahan Inventori	295.94	278.76	252.36
Net Ekspor Barang dan Jasa	180480.59	128156.73	101730.89
PDRB	3262830.51	2982217.05	2727972.97

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada periode 2021-2023 dapat dilihat dari table 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14
PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2021 – 2023

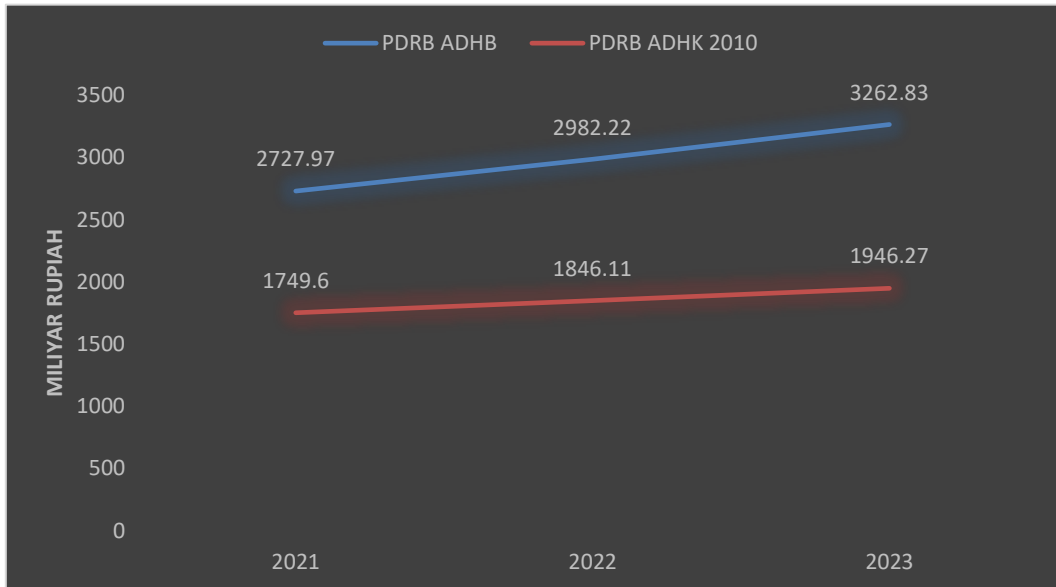
Komponen PDRB Menurut Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)		
	2023	2022	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	944754.27	897437.92	840308.44
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	28366.69	25287.36	23695.05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	462569.84	453621.84	448632.99
Pembentukan Modal Tetap Bruto	554011.7	537764.63	523757.98
Perubahan Inventori	188.49	185.63	173.77
Net Ekspor Barang dan Jasa	-43618.13	-68186.36	-86970.98
PDRB	1946272.86	1846111.03	1749597.25

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Dari tabel 3.14, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan, yakni sebesar 1,74 triliun rupiah pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 1,94 triliun pada tahun 2023. Sedangkan dari grafik 3.3, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami perlambatan pada 3 tahun terakhir. Perekonomian Bolaang Mongondow Utara tumbuh sebesar 6,18 pada tahun 2018, tumbuh lebih lambat pada tahun 2019 sebesar 6,17 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,71 kemudian mengalami percepatan

pertumbuhan sebesar 3,46 persen pada tahun 2021, 5,52 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menjadi 5,43 persen.

Grafik 3.4
Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2021-2023



Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Dari grafik 3.4, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tujuan 4. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Sesuai Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Disamping itu, infrastruktur memiliki keterkaitan penting dengan laju pertumbuhan ekonomi

suatu wilayah karena suatu wilayah yang memiliki infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada kesejahteraan manusia, kualitas hidup, dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sebaliknya, jika infrastrukturnya kurang baik maka akan ada permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang muncul, salah satunya adalah sulitnya menarik investor untuk masuk ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kualitas infrastruktur lebih baik. Target indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 ditetapkan 3,88 point terealisasi 3,55 point (masih menggunakan angka tahun 2021) atau **tingkat capaian 91,49%**, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Tujuan 4

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	3.55	3.88	3.55	91.49	3.88	91.49
Rata-rata capaian Tujuan 4						91.49		

Hasil penilaian untuk seluruh infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 86,34 atau Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR) 35,55 dengan **kategori Baik**. Indeks kinerja yang paling tinggi untuk infrastruktur adalah sekolah dengan nilai 96,41 dan dikategorikan Sangat Baik. Sedangkan indeks kinerja paling rendah adalah infrastruktur persampahan dengan nilai 69,62 atau dikategorikan Kurang Baik.

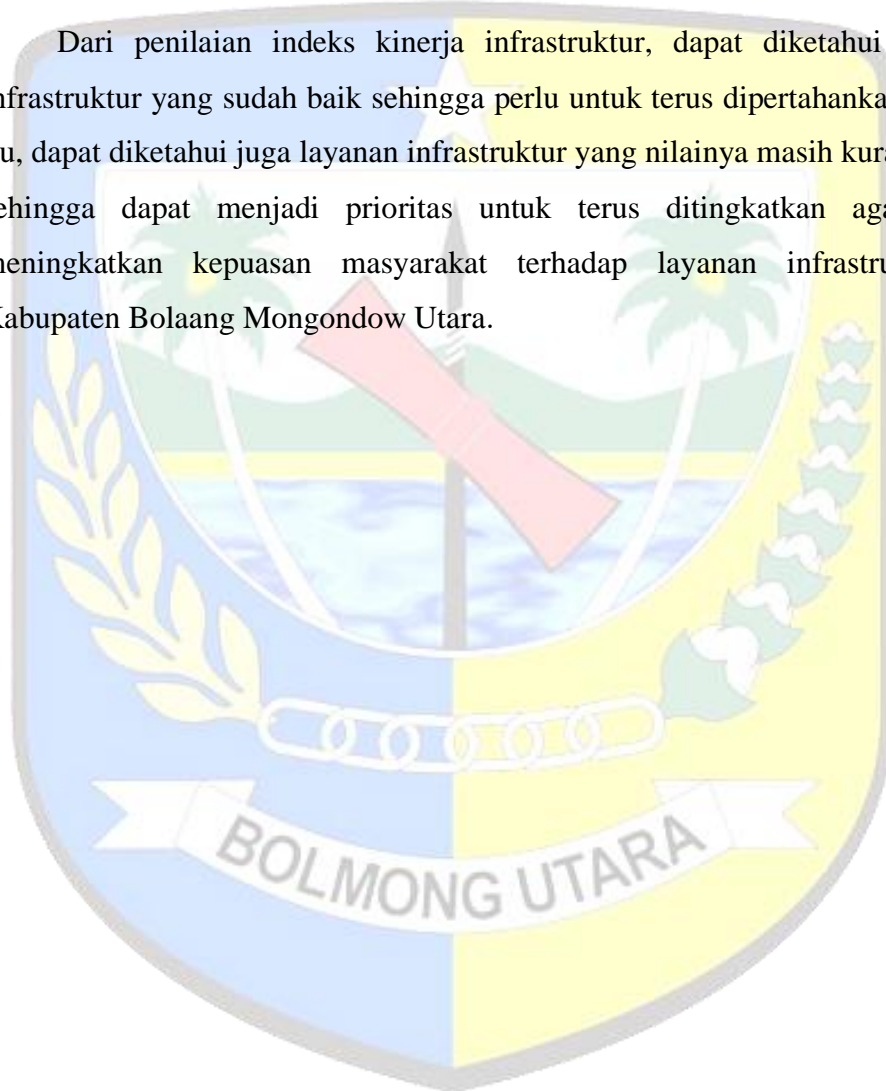
Tabel 3.16
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021

No.	Layanan Infrastruktur	Indeks Kinerja	NRR Tertimbang
1	Irigasi	83.83	3.35
2	Jembatan	87.28	3.49
3	Air minum	72.94	3.49
4	Persampahan	69.62	2.78
5	Drainase	85.04	3.4

6	Tower BTS	88.69	3.55
7	Kelistrikan	93.31	3.73
8	Ruang Terbuka Hijau	84.76	3.73
9	Sekolah	96.41	3.86
10	Rumah Sakit dan Puskesmas	90.25	3.86
11	Pasar	90.01	3.86
IKLI		85.65	3.55

Sumber Data : Kajian IKLI Bapelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021

Dari penilaian indeks kinerja infrastruktur, dapat diketahui layanan infrastruktur yang sudah baik sehingga perlu untuk terus dipertahankan. Selain itu, dapat diketahui juga layanan infrastruktur yang nilainya masih kurang baik, sehingga dapat menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Pada tahun 2023 yang juga merupakan tahun Kelima RPJMD, realisasi pencapaian sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kerjanya yang telah mencapai kinerja Sangat Tinggi. Adapun indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.17
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,34	11,94	12,38	103,69	11,94	103,69
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,57	8,55	8,58	100,35	8,55	100,35
Rata-Rata Capaian						102,02		

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan formula: lamanya sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Target Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2023 adalah 11,94 dan tercapai 12,38 (103,69%). Sedangkan Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang telah digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani, dengan formula :

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana:

RLS = rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

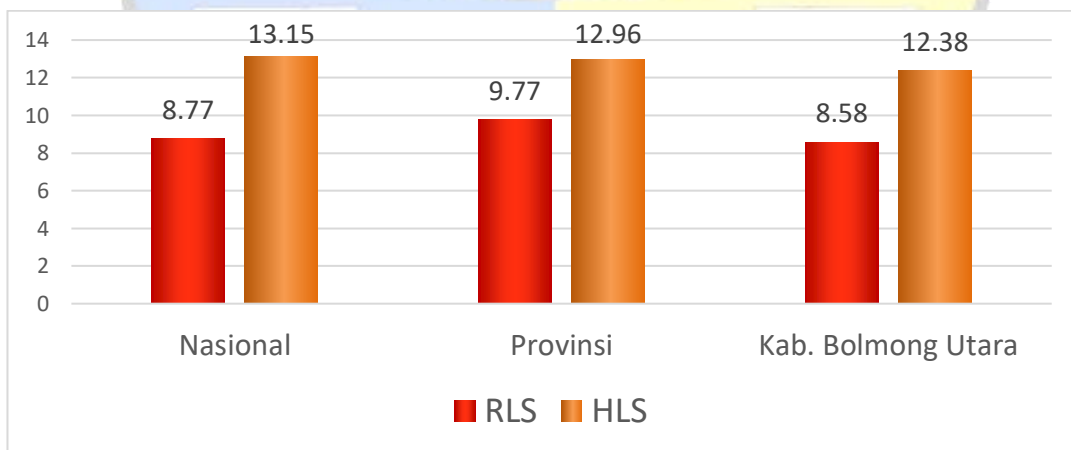
x_i = lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 yang juga merupakan tahun kelima RPJMD dapat diketahui bahwa target capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023 adalah 8,55 tercapai 8,58 (100,35%).

Pada target akhir RPJMD, indikator HLS yaitu 11,94 tahun, dengan realisasi tahun 2023 yaitu 12,38 tahun, maka dapat dinyatakan bahwa capaian pada indikator HLS telah melampaui target. Sementara indikator RLS pada target akhir RPJMD yaitu 8,58 tahun, dengan realisasi pada tahun 2023 yaitu 8,58, dapat dinyatakan sangat berhasil dan berpotensi untuk terus naik jauh melampaui angka yang ditargetkan diakhir RPJMD.

Grafik 3.5 :
Perbandingan Capaian RLS dan HLS antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2023

Grafik 3.5 menunjukkan bahwa untuk capaian HLS pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada dibawah nasional dan Provinsi

Sulawesi Utara. Namun perbedaannya tidak terlalu signifikan, begitupun pada capaian RLS. Hal ini menunjukkan bahwa capaian HLS dan RLS di Bolaang Mongondow Utara sudah cukup maksimal untuk berkontribusi terhadap capaian provinsi dan nasional.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dapat tercapai karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta didukung dengan program-program pada urusan pendidikan baik program pada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan kinerja serta Solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Angka Partisipasi Kasar

APK SD/MI/ sederajat tahun 2023 dari target 100% dapat mencapai angka 102,29% jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian adalah 109,10%. Lain Halnya dengan pencapaian APK SMP/MTs/ sederajat dimana dari target 100% pada tahun 2023 capaian yang diperoleh sebesar 101,83% atau capaian kinerja pada angka 101,83%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian APK pada jenjang SMP/MTs/ sederajat masih dibawah dari capaian provinsi yaitu 104,08% dan capaian nasional 104,51%. Namun demikian tetap dilakukan perluasan atau peningkatan aksesibilitas pendidikan pada jenjang pendidikan SMP sederajat.

2. Angka Kelulusan SMP/MTs

Pencapaian Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs diperoleh dari formula jumlah penduduk yang mencapai jenjang Pendidikan SMP/MI pada tahun t dibagi total jumlah penduduk pada tahun t x 100. Data pencapaian indikator ini diperoleh dari aplikasi data Dapodik di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Realisasi tahun 2023 adalah 100% dengan capaian 100%, masih sama dengan capaian tahun lalu yaitu 100%. Tercapaiannya target kelulusan SMP/MTs karena pengembangan dan pengayaan dalam proses belajar mengajar terus ditingkatkan dalam upaya peningkatan kualitas Pendidikan agar lebih baik. Alternatif Solusi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan memperkuat sosialisasi terkait program/kegiatan yang mendukung hal tersebut.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RPJMD, bahwa peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan menjadi focus utama pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara periode 2018-2023. Di Tahun 2023 guru SD yang memiliki ijazah S.1 dan sertifikat Pendidikan mencapai 91,57% angka ini hampir mendekati target yang sudah ditetapkan. Untuk jenjang PAUD yang masih dibawah target yaitu baru mencapai 12,87%. Kondisi ini menunjukkan kualifikasi guru PAUD masih belum memenuhi standar nasional. Walaupun masih banyak guru PAUD yang berijazah SMA dan D3 hal ini tidak mungkin menggantikan para pendidik PAUD tersebut, tetapi Upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kompetensi tenaga pendidik PAUD dalam hal ini adalah diklat berjenjang yang bertujuan mempersiapkan Pendidikan agar menjadi lebih professional dalam menjalankan tugasnya yaitu merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatuhan, pengasuhan dan perlindungan serta agar dapat memenuhi empat kompetensi utamanya yaitu Kepribadian, professional, pedagogic dan social.

Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis 2 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi 1 yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023, yaitu “*Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya*” dan Tujuan “*Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia*”. Pengukuran pencapaian sasaran dua berdasarkan pada data BPS tahun 2024 yang didukung oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Perangkat Daerah utama. Untuk mengukur sasaran tersebut ada 1 (satu) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja

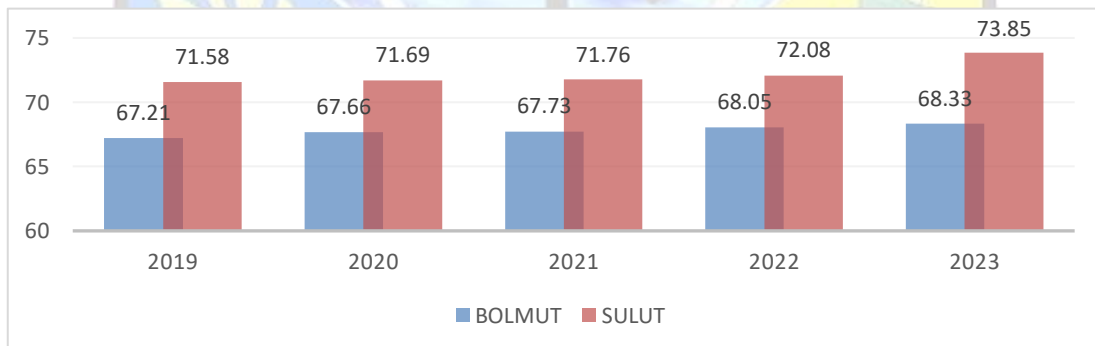
sasarannya sebesar 107,42 % dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.18
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,05	68,34	68,33	99,99	68,33	99,99
Rata-Rata Capaian						99,99		

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH, merupakan satu komponen pembentuk IPM dari aspek kesehatan. Pada tahun 2023, AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai 68,33 tahun, itu artinya meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dari Tahun 2019 s/d Tahun 2023

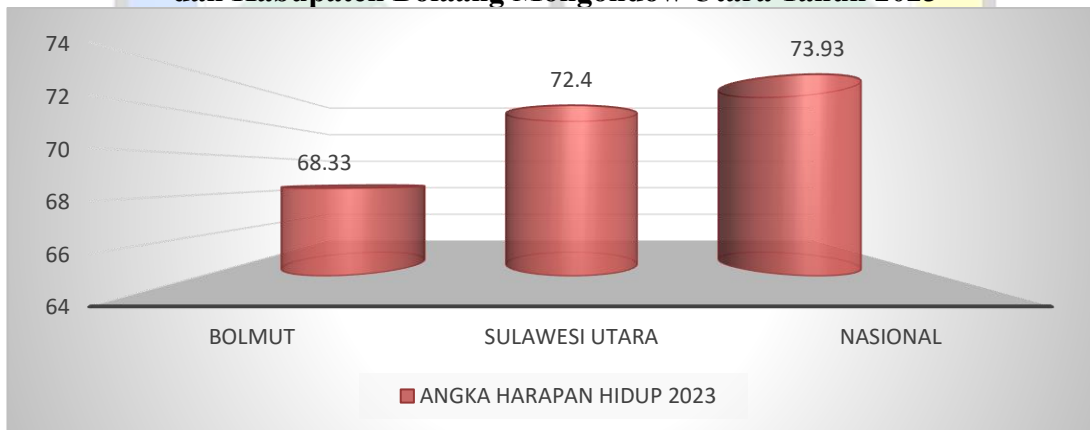


Sumber: Data BPS Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023.

Berdasarkan grafik 3.6 dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus meningkat, yaitu dari angka 67.21 tahun pada 2019 menjadi 67.66 tahun pada tahun 2020. Semakin meningkatnya AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin membaik, karena AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup mencapai 67,73 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 67-68

tahun. Begitu pula yang terjadi pada Tahun 2022, Angka Harapan Hidup meningkat dari 67.73 pada Tahun 2021 kini meningkat menjadi 68.05 dengan kenaikan 0.32 dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 atau tahun terakhir RPJMD Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 68,33 dengan kenaikan 0,28 dari tahun sebelumnya. Walaupun Angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dibawah angka provinsi dan nasional (Grafik 3.7) namun selalu menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, artinya kualitas kesehatan penduduk terus membaik.

Grafik 3.7
Perbandingan Angka Harapan Hidup Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

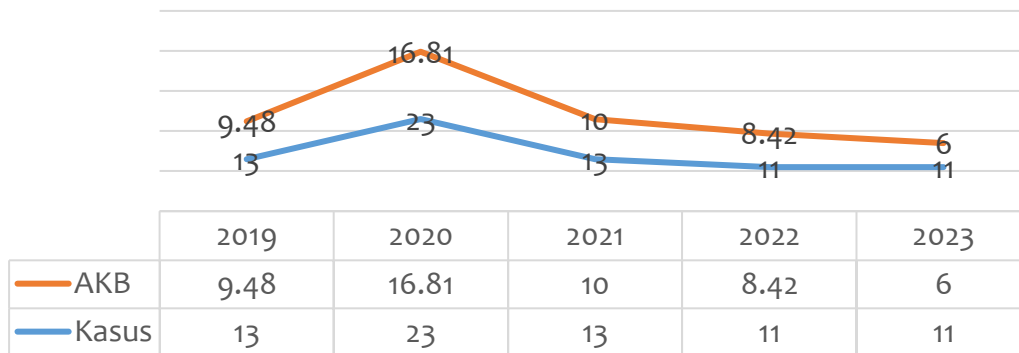


Sumber: Data BPS Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023.

Semakin membaiknya angka harapan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada dasarnya didukung oleh beberapa kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesehatan, seperti: menurunnya angka kematian bayi, prevalensi stunting, persentase penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, akses layanan kesehatan, dan kualitas air dan sanitasi.

a. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Grafik 3.8
Angka Kematian Bayi Dari Tahun 2018 s/d 2023



Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai target, sesuai dengan perhitungan dari Rasio angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dengan menggunakan perhitungan *Infant Mortality Rate (IMR)*, Target RPJMN Rasio angka kematian bayi 16/1000, untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara target kematian bayi 16,39/1000 orang dan pada Tahun 2023 Angka Kematian Bayi 6/1000 kelahiran hidup dengan total lematian 11 kasus dari 1289 total angka kelahiran Hidup dalam 1 Tahun. Kematian Bayi terdiri dari kematian Neonatal (0-28 hari) 11 orang. Dengan penyebab kematian Neonatal berat badan lahir rendah dan Asfiksia, dan penyebab kematian Bayi Febris.

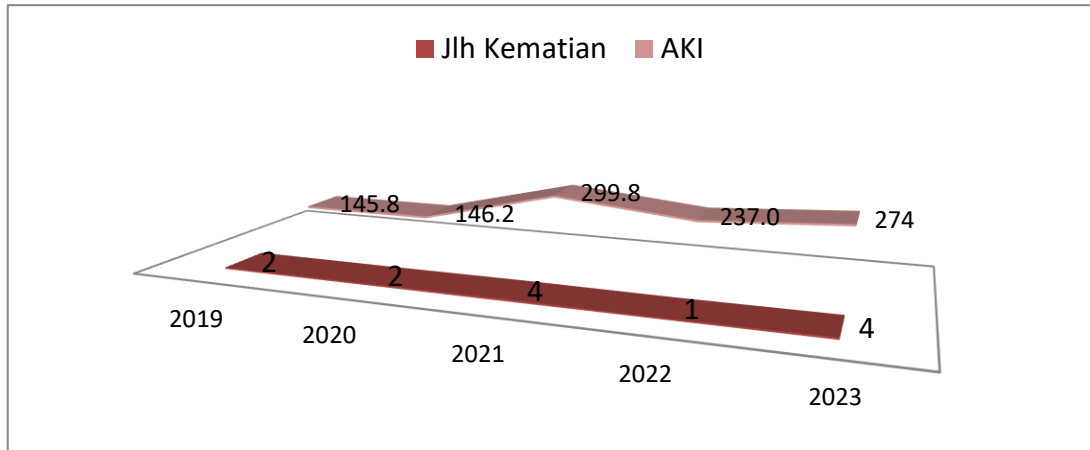
Tabel 3.19
Penyebab Kemmtian Bayi Tahun 2023

No	Penyebab Kematian	Jumlah Kematian 0-28 Hr	Jumlah Kematian 29 hr-11 Bulan
1	BBLR	7	0
2	Asfiksia	3	0
3	Prematur	1	0
4	Demam Tinggi	-	0
Jumlah		11	0

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

b. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

Grafik 3.9
Kondisi AKI dan Jumlah Kematian Ibu dari Tahun 2018 s/d 2023



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

Berdasarkan grafik diatas, Angka kematian ibu tahun 2021 76,6 (1 Kasus) dari Rasio angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan menggunakan perhitungan *Maternal Mortality Rate (MMR)*, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah mencapai target Rasio angka kematian ibu secara Nasional 183/100.000 Kelahiran Hidup, untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara target kematian ibu 2 orang dan pada Tahun 2023 terdapat kematian ibu 4 kasus dari total kelahiran hiduo 1471. Angka Kematian Ibu Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 hanya 1 kasus kematian ibu, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah ibu hamil dengan resiko tinggi, terlalu tua dan terlalu muda untuk hamil. Sudah dilakukan tindakan pertolongan persalinan sesuai prosedur akan tetapi mengalami kendala pada akses rujukan Rumah Sakit yang teralalu jauh dan adanya penolakan dari pihak keluarga untuk dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit meskipun sudah dilakukan edukasi oleh tenaga kesehatan sehingga memperlambat proses rujukan. Pentingnya optomalisasi kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan agar penurunan angka kematian ibu dan bayi tidak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

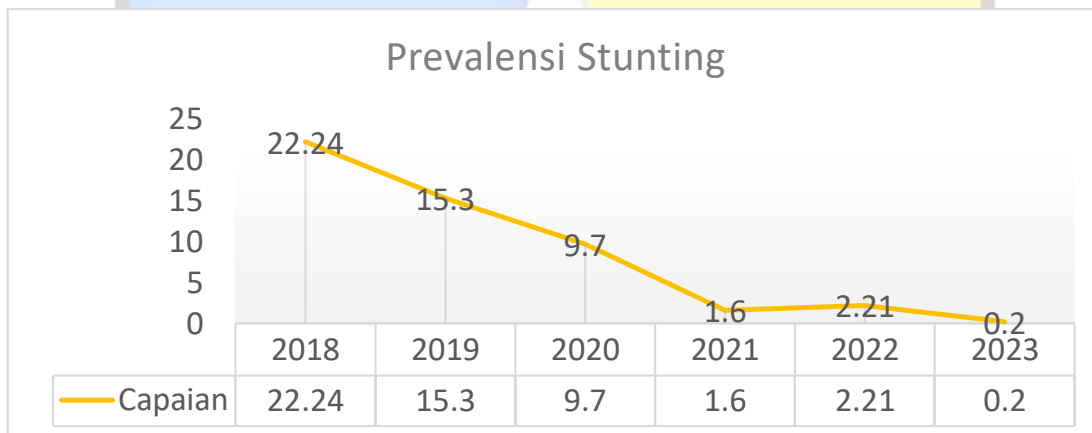
Tabel 3.20
Penyebab Kematian ibu Tahun 2023

No	Penyebab Kematian	Jumlah Kematian (kasus)
1	Pre Eklampsia	1
2	Infeksi Post Operasi	3
Jumlah		4 (kasus)

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

c. Prevalensi Stunting

Grafik 3.10
Prevelensi Stunting



Sumber; Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023..

Pada tahun 2016, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan kabupaten dengan angka stunting yang tinggi berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan prevelensi sebesar 43,80% menjadi 36,80% pada tahun 2017 dan mengalami penurunan kembali sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) menunjukkan prevelensi stunting sebesar 22,24%. Pada tahun 2020 berdasarkan hasil e-PPGBM prevelensi stunting sebesar 9,7% menjadi 1,6% pada tahun 2021 naik kembali pada tahun 2022 sebesar 2,21%. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan prevelensi stunting sebesar 0,2%.

Terjadinya prevelensi stunting sebesar 2,01% pada tahun sebelumnya dikarenakan sebagian balita sudah drop out dari sasaran dan efektifnya intervensi penanganan stunting lewat pemberian PMT pada ibu hamil, bayi dan balita. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mencapai target stunting pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara tahun 2018-2023 yaitu pada angka 10%, sertad mendukung target stunting pemerintah pusat pada RPJMN tahun 2020-2024 yaitu pada angka 14%. Namun hal yang perlu menjadi perhatian bersama, masih adanya keluarga beresiko stunting dari 22.716 jumlah keluarga terdapat 48% atau 10.916 keluarga beresiko stunting yang tersebar di Kbaupaten Bolaang Mongondow Utara.

Inovasi *Mairu Molihuto Stunting* adalah sebuah inovasi yang diangkat dari kearifan lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana kata *Mairu* memiliki arti ajakan/mengajak, sedangkan *Molihuto* artinya sama dengan Malendong yang artinya bekerja sama, gotong royong(keroyokan). Inovasi *Mairu Molihuto Stunting* memiliki arti luas bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama 15 SKPD terkait, Tim Penggerak PKK, dan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan serta beberapa organisasi lainnya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

d. Indeks Keluarga Sehat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Kementerian Kesehatan telah merumuskan 12 indikator yang dipakai untuk menentukan suatu keluarga tergolong sehat atau tidak. Hasil penilaian dari 12 indikator tersebut Indeks Keluarga Sehat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendaptkan nilai 0,136 atau masih tergolong keluarga tidak sehat.

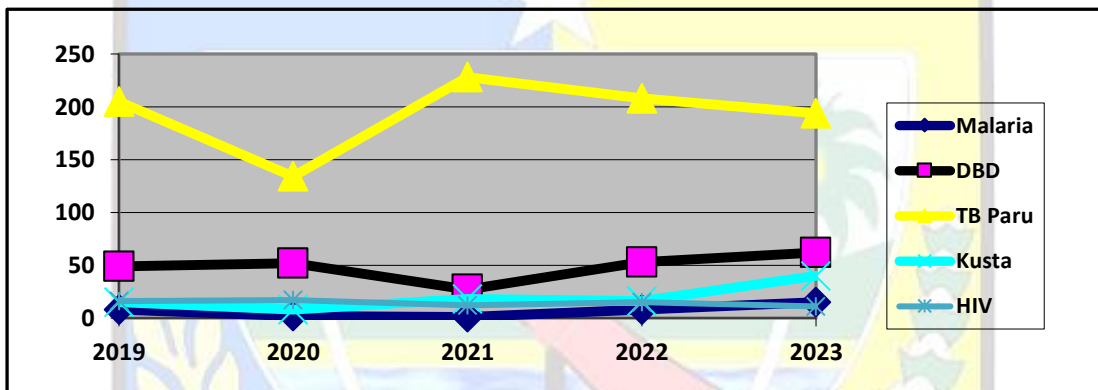
Keluarga Sehat	>0,800
Keluarga Pra Sehat	0,500-0,800
Keluarga Tidak Sehat	<0,500

Kabuoaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan Program PIS-PK pada tahun 2018 dengan lokus 2 Puskesmas yang menjadi Percontohan penggunaan aplikasi dan pendataan keluarga sehat. Pada tahun 2019 seluruh puskesmas dikerahkan untuk melkukan pendataan ke rumah-

rumah penduduk dan dilakukan Entri pada aplikasi PIS-PK dan pada Tahun 2020 dengan adanya kendala Pandemi Covid 19 tenaga Kesehatan Puskesmas belum menyelesaikan pendataan entri data, sehingga capaian Indeks Keluarga Sehat Tahun 2021 sampai Tahun 2023 belum mencapai target.

e. Penyakit Menular

Grafik 3.11
Jumlah penyakit menular di Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023



Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

Angka kejadian kasus DBD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus dari tahun 2022 yang hanya 53 kasus.

Peningkatan kasus demam berdarah pada tahun 2023 sebanyak 62 kasus dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Untuk deteksi dini kasus DBD, program DBD pada tahun 2022 ditunjang dengan alat RDT DBD NS1 sehingga untuk kegiatan penyelidikan epidemiologi dan survey demam kasus DBD lebih cepat terdeteksi.
2. Lingkungan secara signifikan mempengaruhi kesakitan bagi setiap individu termasuk sosial, ekonomi, dan lebih utamanya perilaku masyarakat, meningkatnya mobilitas penduduk, kepadatan hunian, semakin baiknya sarana transportasi dan masih terdapat tempat perindukan nyamuk penular DBD.

3. Faktor perilaku pencegahan yang seharusnya secara rutin dilakukan tetapi masih kurang diperhatikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dengan lingkungan yang dapat meningkatkan kejadian DBD.

Trend penemuan kasus TBC tahun 2023 sebanyak 194 kasus, dari target 257 kasus. Penemuan kasus tahun 2023 mengalami penurunan dari 2022, dikarenakan banyak pengelola program yang pindah tugas/mutasi/berhenti. Sehingga kegiatan penemuan kasusnya menurun dan adanya kekosongan tenaga analis laboratorium dalam Lab TBC sehingga pemeriksaan di puskesmas pun menurun.

Penemuan kasus kusta 2023 mengalami peningkatan dari penemuan kasus kusta 2022 sebanyak 40 kasus. Peningkatan ini terjadi akibat kurangnya angka penemuan kasus di tahun-tahun sebelumnya dimana penderita cenderung menyembunyikan tanda dan gejala yang muncul, stigmanegatif dari masyarakat juga membuat hasil sulitnya petugas dalam melaksanakan pemeriksaan kontak, ketersediaan logistik dan obat-obatan juga perlu menjadi perhatian karena kekosongan maka tidak jarang penderita yang putus dalam pengobatan dan mengakibatkan tingginya penyebaran di beberapa wilayah Kab. Bomut. Kabupaten Bolmut memilih estimasi penemuan kasus kusta 1:10.000 jlmh penduduk, dengan angka estimasi 6 kasus dalam 1 tahun.

Trend penemuan kasus malaria sejak tahun 2022 sampai 2023 terjadi kenaikan yaitu dari 8 kasus positif terkonfirmasi malaria di tahun 2022 menjadi 15 kasus positif terkonfirmasi malaria di tahun 2023. *Annual Parasite Incident (API)* kabupaten yaitu 0,01/1000 penduduk di tahun 2021 menjadi 0,1/1000 penduduk di tahun 2023. bila di lihat dari angka penemuan kasus bisa di simpulkan bahwa kegiatan *Case Aktif Detection* kasus malaria melalui survey migrasi sudah semakin aktif di laksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, hal ini di dukung oleh adanya anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Data ini di kuatkan dengan angka *Slide Positif Rate (SPR)* kabupaten yang berada di angka <5%, serta klasifikasi kasus positif yang di temukan merupakan kasus import dari daerah-daerah endemis malaria di Indonesia dan tidak di

temukan kasus penularan setempat. namun dari beberapa keberhasilan tersebut terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan pengendalian malaria yang antaranya : Angka *Annual Blood Exemination Rate* (ABER) 0,03 % yang masih sangat jauh dari target yaitu sebesar 10% hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat yaitu tidak adanya tenaga laboratorium di seluruh puskesmas sehingga deteksi dini berbasis laboratorium tidak sepenuhnya terealisasi, di samping pelatihan peningkatan kapasitas petugas tentang penyakit malaria yang masih minim.

HIV jumlah kasus 11 orang, trend kasus HIV mengalami penurunan pada tahun 2022 berjumlah 15 orang. Peningkatan kasus positif HIV/AIDS karena pengelola program yang ada di wilayah kerja puskesmas selalu melaksanakan Screening dengan menggunakan rapid baik pada ibu hamil maupun orang yang mempunyai keluhan serta tanda dan gejala HIV/AIDS. Hambatan : Adanya penolakan untuk melakukan pemeriksaan kontak, Tantangan : Masih adanya Diskriminasi pada Orang yang dengan HIV/AIDS.

Tabel 3.21
Kasus Penyakit Menular di Masyarakat Tahun 2018-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jlh Penderita Malaria	8	2	1	8	15
	Jlh Yang tertangani	8	2	1	8	15
	%	100	100	100	100	100
2	Jlh Penderita DBD	49	52	27	53	62
	Jlh Yang Tertangani	49	52	27	53	62
	%	100	100	100	100	100
3	Jlh Penderita TB Paru	205	134	228	208	194
	Jlh Yang tertangani	205	134	228	208	194
	%	100	100	100	100	100
4	Jlh Penderita Kusta	15	8	18	16	40
	Jlh Yang Tertangani	12	8	18	16	40
	%	100	100	100	100	100
5	Jlh Penderita HIV	16	17	12	15	11
	Jlh Yang Tertangani	16	17	12	15	11
	%	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

f. Penyakit Tidak Menular

Tabel 3.22
Kasus Penyakit Tidak Menular di Masyarakat Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jlh Penderita Hipertensi	3498	13985	13985	13985	13985
	Jlh Yang tertangani	3498	7085	10128	10910	10861
	%	100%	51%	72%	78 %	84,81 %
2	Jlh Penderita Diabetes Melitus	244	941	1394	1690	1690
	Jlh Yang Tertangani	244	1312	1394	1690	1690
	%	100%	139%	100%	100%	100%
3	Jlh Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	155	135	163	156	198
	Jlh Yang tertangani	116	95	163	156	198
	%	75%	70%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan 84,81%, secara keseluruhan di tiap puskesmas. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dilaksanakan di Fasyankes dan di Posbindu PTM, maupun pelayanan homecare. Persentase penderita hipertensi terbanyak adalah perempuan sebanyak 8.704 orang (73,42%) dan penderita hipertensi laki-laki 3.153 orang (26,58%). Dari total penderita hipertensi yang tertinggi di Puskesmas Boroko 1963 Orang (16,55%) dari total Jumlah Penderita.

Jumlah sasaran penderita diabetes melitus di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1.690 Orang, dan yang mendapatkan Pelayanan 1.690 orang. Hal ini melebihi dari target sasaran dengan dilaksanakannya Skrinning PTM di masyarakat. Dapat di lihat bahwa terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya. penderita laki-laki berjumlah 300 Orang dan perempuan 1.094 Orang lebih banyak dari penderita laki-laki. Wilayah kerja Puskesmas Boroko merupakan daerah dengan tingkat penderita DM paling banyak yaitu 296 Orang.

Berdasarkan sasaran kasus baru ODGJ di tahun 2023 adalah 198 kasus, wilayah kerja Puskesmas Boroko, Puskesmas Bolangitang dan Puskesmas Ollot merupakan puskesmas dengan tingkat penemuan kasus baru yang tinggi. Jumlah keseluruhan kasus ODGJ yang tertangani adalah 198 kasus dan masih ada beberapa penderita kesehatan jiwa yang belum terdata.

Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis 3 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya” dan Tujuan “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”. Pengukuran pencapaian sasaran tiga “Meningkatnya daya beli masyarakat diwakili oleh dua indikator yaitu (1) Rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan dan (2) Gini rasio. Nilai rata-rata capaian kedua indikator sasaran tersebut tersebut mencapai 91,07 Persen dengan kategori Berhasil.

Tabel 3.23
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita disesuaikan	JutaRp	9,28	9,92	9,65	97,30	9,92	97,30
2	Gini Ratio	Poin	0,35	0,33	0,38	84,85	0,33	84,85
Capaian Rata-Rata						91,07		

Berdasarkan tabel 3.22 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator “Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan pada tahun 2023 ditargetkan 9,92 juta rupiah dengan realisasi 9,65 juta rupiah tingkat capaian 97,30 %. Capaian ini menghampiri target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dinyatakan terjadi peningkatan sebesar 0,37

jutaruoiah, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya mencapai 97,30 %.

Capaian indikator gini ratio tahun 2023 adalah 0,38 (poin) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, dapat dinyatakan terjadi peningkatan ketimpangan yaitu sebesar 0,03 poin, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya mencapai 84,85 %.

1). Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam laporan ini diperoleh dari publikasi BPS berupa Statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023.

Grafik 3.12
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Lima Tahun Terakhir.

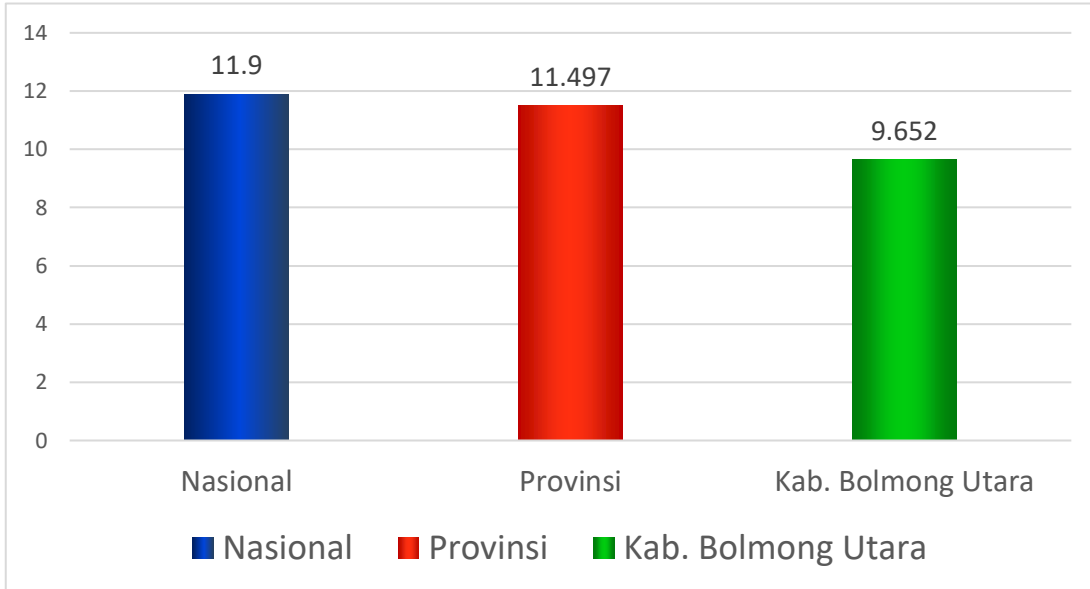


Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak pembatasan sosial dimasa pandemic covid-19 yang secara perlahan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat, hal ini juga dapat dikaitkan dengan angka pengangguran yang naik pada tahun yang sama. Sementara pada grafik 3.13 dapat diketahui bahwa pengeluaran perkapita kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Tahun 2023 masih dibawah nasional (11,90) dan provinsi Sulawesi Utara (11,49).

Grafik 3.13
Perbandingan Pengeluaran perkapita Nasional, Provinsi dan Kabupaten



Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2024

Selain itu, peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Konsumsi merupakan salah satu unsur penting dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB) yang mengindikasikan aktivitas ekonomi suatu negara atau daerah. Jika masyarakat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan kemudian menghabiskan uang mereka pada barang dan jasa, hal ini dapat meningkatkan permintaan yang kemudian memicu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meskipun terlihat kecil, tetap memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita dapat memiliki dampak negatif, seperti inflasi. Jika harga barang dan jasa naik akibat meningkatnya permintaan, maka nilai uang akan menurun dan ini dapat memicu kenaikan harga yang berlebihan atau inflasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian inflasi agar peningkatan rata-

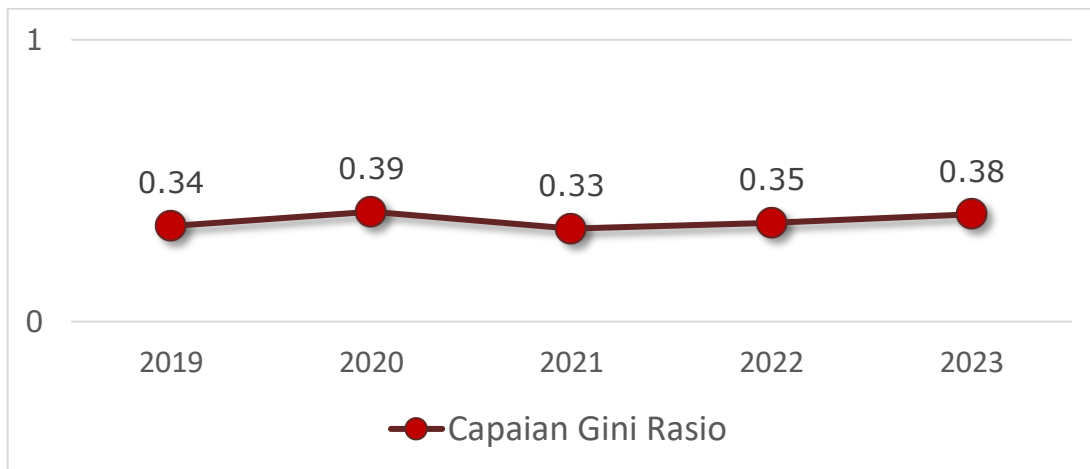
rata pengeluaran perkapita tidak berdampak buruk pada perekonomian dan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2). Gini Rasio

Gini Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Data Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 0,34. Namun, pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 0,39, turun menjadi 0,33 pada tahun 2021, kembali naik menjadi 0,35 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 naik menjadi 0,38. Gini Ratio yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan di daerah tersebut, sedangkan penurunan Gini Ratio menunjukkan adanya pengurangan ketimpangan pendapatan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Salah satu faktornya adalah kualitas pendidikan dan keterampilan. Masyarakat dengan kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik biasanya lebih mampu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Faktor lainnya adalah akses terhadap sumber daya dan peluang. Masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang lebih besar, seperti akses terhadap tanah, air, dan modal usaha, biasanya memiliki pendapatan yang lebih tinggi.

Grafik 3.14
Kondisi Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2023



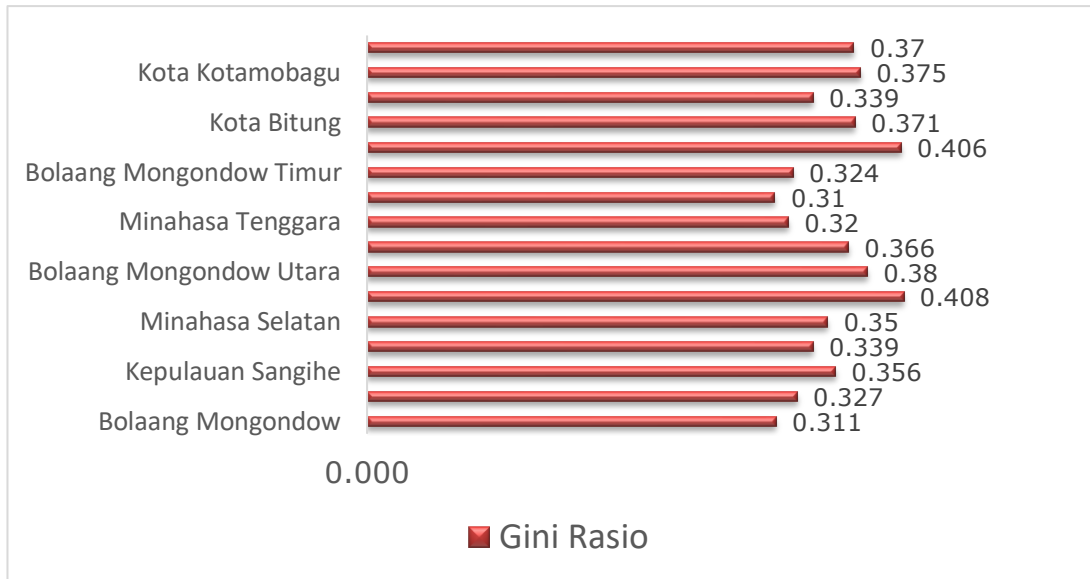
Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2024

Untuk menurunkan Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha dan akses ke pasar bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Pemerintah juga dapat memberikan akses terhadap tanah dan air bagi masyarakat yang berada di wilayah yang kurang berkembang.

Namun, jika tren Gini Ratio terus meningkat, perlu dilakukan upaya yang lebih besar. Pemerintah dapat melakukan program redistribusi pendapatan, seperti pajak progresif dan pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga dapat mengurangi ketimpangan di sektor-sektor yang mempengaruhi penghasilan masyarakat, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

Grafik 3.15
Perbandingan Kondisi Gini Ratio se-Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2024

Dalam mengatasi masalah Gini Ratio, perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dibutuhkan program-program yang terencana dan terukur serta koordinasi yang baik antara sektor-sektor terkait. Selain itu, penting juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dari program-program tersebut.

Secara keseluruhan, Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya fluktuasi yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti pengangguran, migrasi, dan kesejahteraan sosial.

Pengangguran dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena mengurangi pendapatan keluarga dan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Pemerintah

dapat memberikan insentif dan bantuan bagi sektor swasta untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Migrasi juga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena dapat meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja dan menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan akibat migrasi, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah asal migran dan mengurangi disparitas antara daerah asal dan tujuan migrasi.

Kesejahteraan sosial juga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial dan jaminan kesehatan.

Dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan Gini Ratio, perlu dilakukan upaya yang bersifat preventif dan kuratif. Upaya preventif meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum ketimpangan terjadi, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memberikan akses terhadap sumber daya dan peluang. Upaya kuratif meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan setelah ketimpangan terjadi, seperti program redistribusi pendapatan dan bantuan keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dalam kesimpulannya, data Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya fluktuasi selama empat tahun terakhir. Diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti kualitas pendidikan dan keterampilan, akses terhadap sumber daya dan peluang, pengangguran, migrasi, dan kesejahteraan sosial. Upaya preventif dan kuratif perlu dilakukan

untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sasaran 4 : Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga

Sasaran strategis 4 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi 1 yaitu “*Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya*” dan Tujuan “*Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia*”. Pengukuran pencapaian sasaran 4 “menurunnya beban pengeluaran keluarga diwakili oleh dua indikator yaitu (1) tingkat pengangguran terbuka (2) persentase keluarga sejahtera. Nilai rata-rata capaian kedua indikator sasaran tersebut tersebut mencapai 111.75 Persen dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.24
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.10	3.63	4.48	76.58	3.63	76.58
2	Presentase Keluarga Sejahtera	Persen	74.90	50.98	74.90	146.92	50.98	146.92
Capaian Rata-Rata						111,75		

1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan tabel 3.23 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator “tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2023 ditargetkan 3.63 persen dengan realisasi 4.48 Persen. Indikator ini tidak mencapai target. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu (5.10), dapat dinyatakan menurun, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka kinerjanya mencapai 76.58 %. Indikator TPT tidak tercapai pada akhir tahun RPJMD. Dengan demikian sangat diperlukan kebijakan-kebijakan yang bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Misalnya kebijakan seperti perluasan kesempatan kerja, mengurangi urbanisasi guna

mencegah pengangguran di kota besar, penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dan lain-lain.

Salah satu masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

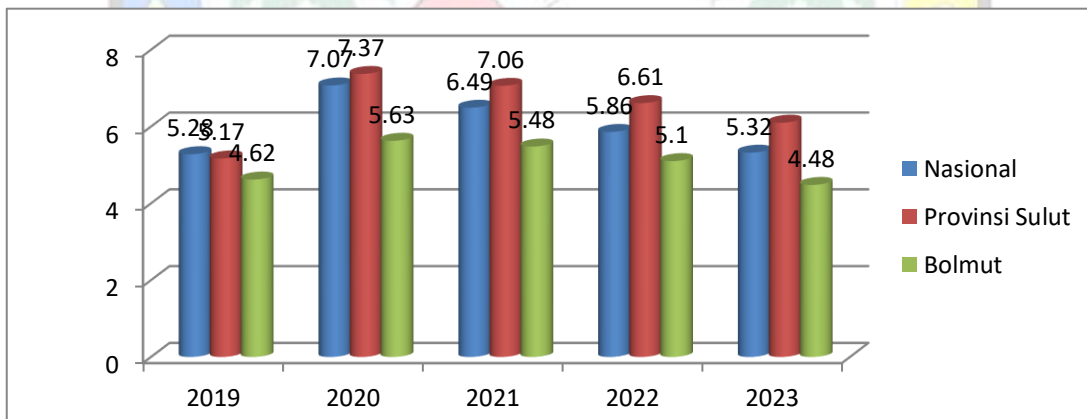
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja dengan pola perhitungan :

$$TPT = \frac{\text{Pencari Kerja}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum dibarengi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Tingkat pengangguran

terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara rentang waktu 2018-2021 cenderung mengalami peningkatan, berangkat dari angka **3.42** persen pada tahun 2018 menjadi **4.48** persen pada tahun 2023. Naiknya pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak selalu menandakan kondisi perekonomian yang sedang lesu, namun lebih diakibatkan oleh naiknya jumlah angkatan kerja (sebagaimana pada tabel 3.28) transformasi/pergeseran struktur ekonomi serta korelasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal, disamping itu faktor dampak bencana non alam (pandemic covid-19) yang menyebabkan banyak karyawan dirumahkan.

Grafik 3.16
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka 5 Tahun Terakhir.



Sumber : BPS Tahun 2024

Berdasarkan grafik 3.16 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 baik secara Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten, dimana pada tahun tersebut merupakan puncak kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia. Secara perlahan terjadi penurunan angka pengangguran pada tahun 2021 dan terus berlanjut pada tahun 2023. Walaupun tidak begitu besar, dengan adanya penurunan tersebut menandakan bahwa secara perlahan perekonomian Indonesia mulai bangkit setelah dilakukannya berbagai upaya kebijakan oleh Pemerintah.

Tabel 3.25
Kondisi Angkatan Kerja Tahun 2023

No	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
1	39,538	1,853	41,391	95,52

Sumber : BPS 2024

Dapat dilihat dari table diatas Tingkat Pengangguran Terbuka juga disebabkan karena terdapat Sebagian dari Angkatan kerja belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan serta ditambah lulusan SMA atau sederajat yang sudah lulus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi sehingga menambah angka pengangguran. Adapun langkah yang ditempuh Pemda Bolmut untuk menanggulangi angka pengangguran yaitu melaksanakan jenis pelatihan yang dibutuhkan dunia saat ini. Membangun kerja sama dengan Perusahaan baik dalam daerah maupun luar daerah agar tenaga kerja yang mempunyai skill atau keterampilan dapat bekerja di Perusahaan yang membuka lowongan kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Perusahaan.

2) Presentase Kesejahteraan Keluarga

Pada indikator “persentase keluarga sejahtera” tahun 2023 ditargetkan 50,98 persen dengan realisas 74,90, tingkat **capaian 146,92** dinyatakan sangat berhasil. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya mencapai 146,92 %, dapat dinyatakan telah melampaui target akhir RPJMD. Indikator persentase keluarga sejahtera adalah indicator baru hasil perubahan RPJMD 2018-2023.

Keluarga Sejahtera merupakan landasan awal terciptanya masyarakat yang harmoni. Dari Keluarga Sejahtera akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas sehingga akan terwujud pula bangsa yang berkualitas. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi,

selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Tingkat Kesejahteraan Keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

- (1) Keluarga Pra Sejahtera (KPS);
- (2) Keluarga Sejahtera I (KSI);
- (3) Keluarga Sejahtera II (KS-II);
- (4) Keluarga Sejahtera III (KS-III); dan
- (5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus).

Adapun kondisi perkembangan keluarga sejahtera di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam beberapa Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.29 dibawah ini :

Tabel 3.26
Kondisi Keluarga Sejahtera Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Beberapa Tahun Terakhir

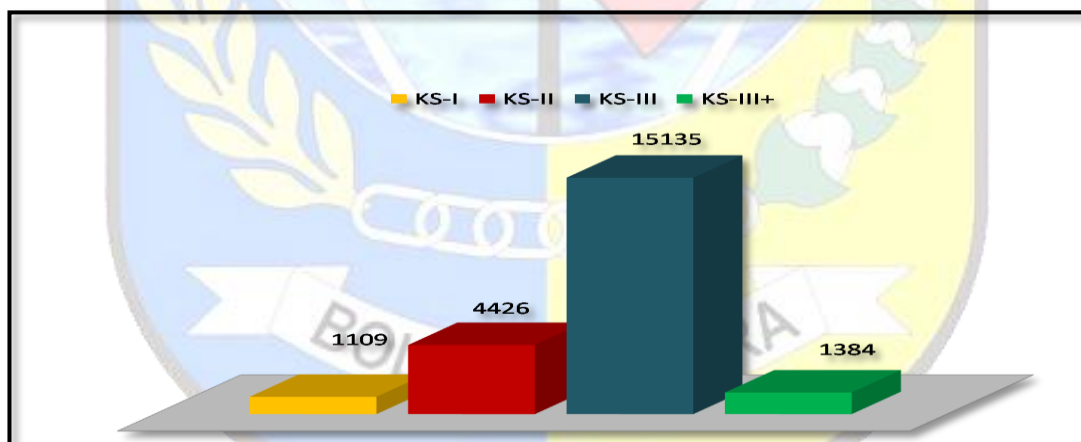
Kategori Keluarga Sejahtera	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Keluarga Sejahtera I	91	93	1.109	1.109
Keluarga Sejahtera II	149	146	4.426	4.426
Keluarga Sejahtera III	90	85	15.134	15.134
Keluarga Sejahtera III +	9	8	1.384	1.384

Sumber Data : Dinas PPKBPPA Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Berdasarkan tabel 3.25 dapat dilihat bahwa adanya trend kenaikan jumlah keluarga sejahtera yang begitu signifikan pada tahun 2021 dengan tahun – tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan dilaksanakannya Pendataan Keluarga Tahun 2021 atau yang disebut dengan PK-21 secara *door to door* sehingga menghasilkan data yang akurat *by name by address*. Pendataan Keluarga dilakukan serentak se-Indonesia oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mendapatkan basis data keluarga untuk Investasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya. Pendataan

ini juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia yang memiliki fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan serta ekonomi. Selain itu data yang didapatkan melalui Pendataan Keluarga menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan upaya peningkatan ataupun pemerataan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendataan Keluarga ini dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali berdasarkan pada UU 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah No 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dan melakukan Pemutakhiran Data setiap setahun sekali hingga dilaksanakannya kembali Pendataan Keluarga.

Grafik 3.17
Jumlah Keluarga Sejahtera Tahun 2022



Sumber: Dinas PPKBPPA Kab. Bolmong Utara (Diolah Tahun 2022)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 di dominasi oleh Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis serta kebutuhan pengembangan keluarga sebanyak 15.135 Keluarga. Selanjutnya terdapat 4.426 Keluarga dengan Tahapan Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis keluarga. Sebanyak 1.384

keluarga berada pada tahapan Keluarga Sejahtera III plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan serta mampu mengaktualisasikan diri atau *self esteem*. Dan terdapat sebanyak 1.109 keluarga yang masih berada di tahapan keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Dari jumlah keluarga sejahtera berdasarkan tahapan keluarga tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar keluarga yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis dan pengembangan keluarga.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran strategis 5 merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi Ke-2 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good and Clean Government*)” dan tujuan “*mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani*”. Pengukuran pencapaian sasaran 5 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan” diwakili oleh dua indikator yaitu Opini BPK dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pada sasaran ini adalah 98,89 % kategori *Sangat Berhasil*.

Tabel 3.27
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP*	100	WTP	100
2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Sedang	97,77	Tinggi	97,77
Rata-rata Capaian Sasaran 5:						98,89		

Pada tabel 3.26 Di atas, diketahui bahwa kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan diukur dengan 2 indikator yaitu “opini BPK” dan “Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaporan masih dalam audit, namun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima Penghargaan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 6 (enam) kali berturut-turut dari Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia.

Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 3.3341 atau predikat Sedang. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah menunjukkan hasil yang baik.

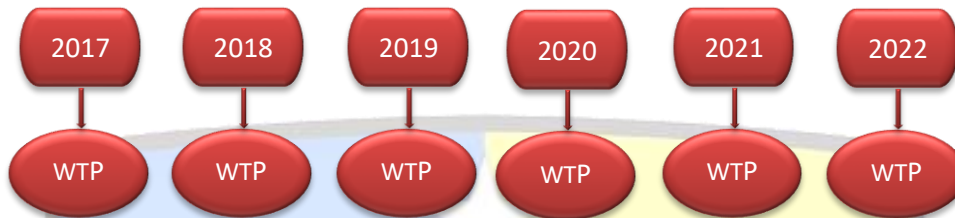
1) Opini BPK

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pengukuran kinerja yang diukur dengan menggunakan hasil audit BPK RI atas LKPD setiap tahunnya. Terdapat tiga penilaian dari hasil audit yang terdapat dalam LKPD yang telah diaudit, antara lain berupa 1). Opini audit atas laporan kuangan, 2). Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, dan 3) Ketaatan pada perundang-undangan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mampu secara konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

laporan keuangan pemerintah daerah. Trend positif atas opini BPK menunjukkan bahwa terjadi perbaikan secara berkelanjutan atas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Gambar 3.1 Opini BPK



Sumber: BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Gambar 3.2 Penyerahan LKPD dan LHP T.A. 2021



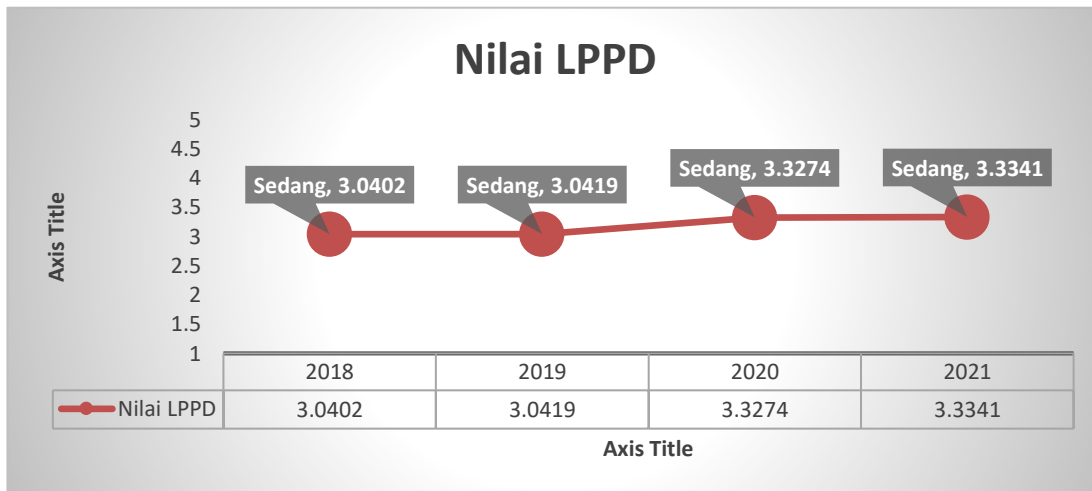
2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri setiap tahun sekali. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EDDP) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah daerah yang baru dibentuk.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan”. Berdasarkan grafik 3.18 diketahui bahwa nilai dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2021 mendapatkan nilai 3.3341 dikategorikan “*Sedang*”. Jika dilihat nilai yang diperoleh, tampak bahwa terjadi peningkatan nilai, yaitu 3.0402 (2018) naik menjadi 3.3341 (2021).

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2021. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7.-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi LPPD secara Nasional, Pemkab Bolmut merupakan terbaik 1 se-Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan trend perkembangan skor ini, dapat diyakini bahwa capaian kinerja indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 akan meningkat dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.18
Nilai LPPD Tahun 2018-2021



Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2024

Tabel 3.28
Daftar Perbandingan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antar Kab/Kota Se-Prov.Sulut Tahun 2023

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Provinsi	Skor	Prestasi
1	KOTA BITUNG	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,0750	SEDANG
2	KOTA MANADO	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,0039	SEDANG
3	KOTA KOTAMOBAGU	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,0544	SEDANG
4	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,0978	SEDANG
5	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,0130	SEDANG
6	KOTA TOMOHON	PROVINSI SULAWESI UTARA	2,5406	RENDAH
7	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	PROVINSI SULAWESI UTARA	2,7492	SEDANG
8	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PROVINSI SULAWESI UTARA	2,4632	RENDAH
9	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	PROVINSI SULAWESI UTARA	2,7930	SEDANG
10	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,0528	SEDANG
11	KABUPATEN MINAHASA UTARA	PROVINSI SULAWESI UTARA	2,8118	SEDANG
12	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	PROVINSI SULAWESI UTARA	2,8495	SEDANG
13	KABUPATEN MINAHASA	PROVINSI SULAWESI UTARA	1,7218	SANGAT RENDAH
14	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,3341	SEDANG
15	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	PROVINSI SULAWESI UTARA	2,5815	RENDAH

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2024

Upaya mencapai kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan” terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jika dilihat dari hasil yang dicapai kinerja urusan pemerintahan, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2022 mencapai

kinerja baik. Namun demikian harus disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam aspek Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, Regulasi maupun Anggaran. Meskipun demikian, dengan segala kekurangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mampu menunjukkan hasil kerjanya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik

Sasaran strategis 6 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi 2 yaitu “*Memantapkan tata kelolah Pemerintahan yang Baik (Good and Clean Government)*” dan Tujuan “*Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani*”. Pengukuran pencapaian sasaran 6 “Meningkatnya pelayanan publik” diwakili oleh satu indikator yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat (Nilai Rata-Rata IKM) capaian kinerja pada sasaran ini adalah 110.28 % kategori *Sangat Berhasil*.

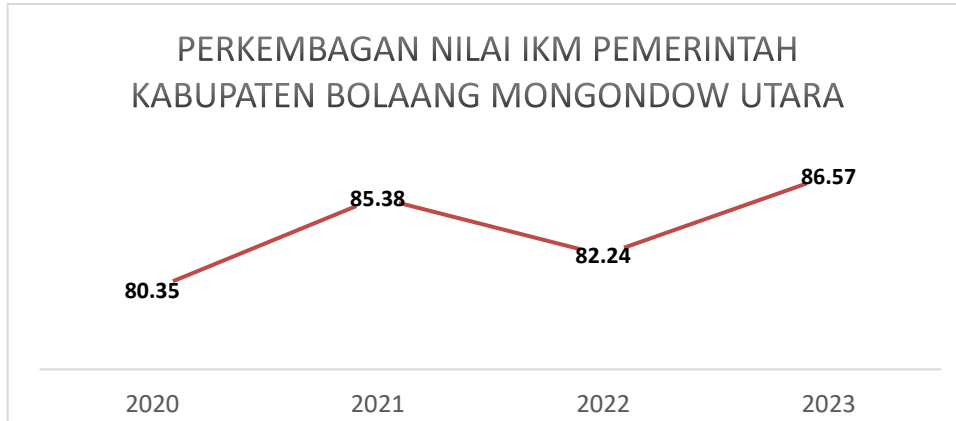
Tabel 3.29
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	Nilai	82,24	78,50	86,57	110,28	78.50	110,28
Rata-Rata						110.28		

Pada Tabel 3.28 Dapat diketahui bahwa kinerja sasaran 6 dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat (nilai rata-rata IKM) ditargetkan 78,50 (Baik) realisasi 86.57 (Baik). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (78.50) capaiannya sebesar 110.28 % atau telah melampaui target akhir RPJMD. Angka yang dicantumkan dalam kolom realisasi adalah angka nilai rata-rata dari keseluruhan nilai IKM hasil survey tahun 2023 pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan Kaidipang, Dinas Sosial Daerah, dan Dinas Kesehatan (UPP PSC199)

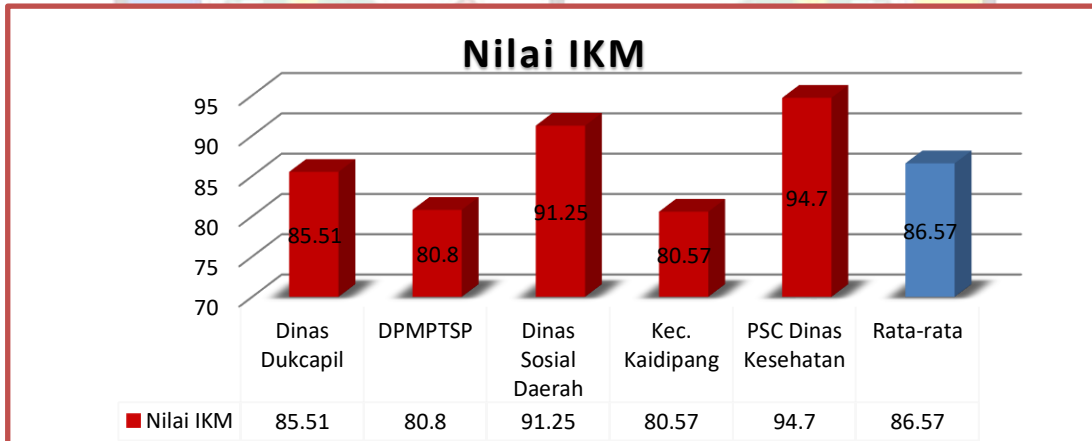
Berdasarkan Grafik 3.19, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Namun demikian, pada tahun 2022, terjadi penurunan nilai IKM menjadi 82,24. perlu kami sampaikan bahwa, pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat SKPD yang telah melaksanakan Survei IKM, namun tidak pernah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah pemda Bolaang mongondow Utara, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian secara keseluruhan. Namun pada tahun 2022, kami menambahkan 4 perangkat daerah untuk dievaluasi pelayanannya melalui survey IKM. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan nilai IKM menjadi 86,57, ini merupakan hasil yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 5 (lima) UPPP yang dinilai merepresentasikan cakupan layanan Barang, Jasa dan Administrasi. Hasil survei tahun 2023 menunjukkan masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu untuk diperbaiki. Upaya perbaikan pelayanan publik akan terus ditingkatkan hal ini sebagaimana termuat dalam isu strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Grafik 3.19
Perkembangan Nilai IKM



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2024

Grafik 3.20
Nilai IKM Pada UPP



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2024

Nilai rata-rata Tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini adalah untuk mendapatkan pengukuran persepsi dan harapan masyarakat dan atau institusi selaku pengguna jasa dengan melakukan survei, analisis dan pemetaan terhadap kinerja pelayanan publik perangkat daerah.

Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator Sasaran Tersebut terdapat beberapa faktor penghambat/pendukung yang dihadapi, diantaranya :

1. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 5 (lima) SKPD/UPPP telah menyampaikan laporannya. Terdapat 30 (Tiga Puluh) SKPD/UPPP yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada

tahun ini;

2. Dari seluruh SKPD/UPPP yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat;

Sasaran 7 : Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah/Local

Sasaran "Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/lokal" di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki beberapa sektor unggulan yang dapat dikembangkan, di antaranya adalah sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tanah di daerah ini cukup subur dan cocok untuk pertanian, sehingga produksi padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan cukup besar. Sasaran ini akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan memperkuat kapasitas petani dan membuka akses pasar untuk produk pertanian.

Perikanan juga merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. memiliki potensi laut yang besar, sehingga sektor perikanan dapat dikembangkan dengan baik. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dengan meningkatkan produksi dan memperkuat kapasitas nelayan di daerah ini.

Sektor pariwisata juga memiliki potensi yang besar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Daerah ini memiliki keindahan alam yang menarik, seperti pantai-pantai indah dan wisata alam. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan mengembangkan

infrastruktur pariwisata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan sektor ini.

Selain itu, dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, diperlukan juga kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah daerah harus memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan potensi unggulan daerah. Masyarakat juga harus diberdayakan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan potensi ekonomi di daerahnya.

Dalam keseluruhan, sasaran "Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/lokal" di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini. Dalam hal ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dan memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sasaran "Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/lokal" yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama dengan rata-rata capaian sebesar 79.46 kategori berhasil.

Berikut table capaian dan perbandingan realisasi tahun sebelumnya:

Tabel 3.30
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	34.03	38.29	34.03	88.87	38,29	88,87
2	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	10.60	11.30	10.04	92,39	11,30	92,39
3	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0.78	1	0.78	78	1,00	78

4	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Milliar	7.20	15.00	15.00	100	17,50	100
Rata-rata Capaian Sasaran 7						89.82		

Analisis capaian kinerja masing-masing indicator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB

Pada tahun 2023, target pertumbuhan subsektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebesar 38,29, dengan realisasi sebesar 34,03 dan capaian kinerja sebesar 88,87%. Kinerja sub sektor pertanian di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan Kondisi cuaca yang tidak menentu juga mempengaruhi kinerja sektor pertanian di berbagai wilayah di Indonesia khususnya kabupaten Bolaang mongondow Utara, menyebabkan produksi pertanian, mengalami dampak yang signifikan.

Tabel 3.31
Peningkatan Produksi Pertanian

No	Komoditas	Peningkatan Produksi Pertanian (Ton)			
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Padi	54,548.00	42,083.00	43,388.00	31.218,00
2	Jagung	50,337.00	51,654.00	53,160.00	26.844,00
3	Cabai	11.76	24.50	27.80	3.40
4	Tomat	2.50	6.40	8.20	0.80
5	Kelapa	15,549.00	15,551.50	15,210.50	15.280,50
6	Kakao	803.00	256.46	424.00	275,00

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Berdasarkan table di atas, terjadi penurunan produksi pada semua komoditas pertanian di wilayah tersebut, seperti padi, jagung, cabai, tomat, dan kakao. Adapun penurunan hasil produksi pertanian di Tahun 2023 karena adanya beberapa factor yang mempengaruhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 tidak tercapai. Ada beberapa hal yang mempengaruhi penurunan hasil produksi pertanian antara lain:

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian (lahan areal persawahan);
2. Iklim yang tidak menunjang;

3. Adanya serangan hama;
4. Adanya jaringan irigasi yang rusak;
5. Buruh tana dan panen berkurang;
6. Tingginya harga benih dan pupuk serta bantuan dari Pemerintah

Dinas pertanian juga telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi pertanian di wilayah tersebut, seperti dengan memberikan pelatihan dan bantuan alat dan bibit kepada petani. Selain itu, kebijakan dan program pemerintah yang mendukung sektor pertanian juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian. Insentif ini meliputi bantuan bibit dan pupuk subsidi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat melalui program pertanian berkelanjutan dan diversifikasi produk pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk pertanian di kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kesimpulannya, sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami penurunan produksi beberapa komoditas pertanian pada tahun 2023, oleh sebab itu kinerja sub sektor pertanian tidak mengalami peningkatan.

2) Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

Sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sektor perikanan menjadi potensi besar dalam menyumbangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan subsektor perikanan menunjukkan tren penurunan. Hal ini tercermin dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2023 belum mencapai target.

Dari data tersebut, kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2023 memiliki target 11,30% dan realisasi sebesar 10,44% dengan capaian kinerja sebesar 92,39%. Pertumbuhan subsektor perikanan menunjukkan tren penurunan karena beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Dalam bidang perikanan tangkap, salah satu masalah yang dihadapi adalah struktur armada yang masih didominasi oleh sistem tradisional. Hal ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Selain itu, ketersediaan pelabuhan pendaratan ikan dalam hal ini dermaga dan TPI masih belum optimal baik dari sisi kelengkapan infrastruktur maupun dari sisi tingkat pelayanan dan operasionalnya. Masalah lainnya adalah belum adanya mesin pembuat es sehingga es kadang didatangkan dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dapat mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, dalam bidang perikanan budidaya, permasalahan yang dihadapi antara lain tingginya harga pakan sehingga membuat tingginya biaya produksi perikanan budidaya. Selain itu, terbatasnya bibit yang bermutu dan prasarana jaringan irigasi yang belum memadai serta potensi tambak yang belum dibuka secara optimal juga menjadi kendala dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang ada dari Dinas Perikanan dan Kelautan terdapat peningkatan produksi pada perikanan budidaya di Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih banyak permasalahan yang perlu diatasi, upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait dalam meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membuahkan hasil yang positif. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan perhatian yang lebih dari semua pihak untuk terus meningkatkan potensi sektor perikanan di daerah tersebut.

Tabel 3.32
Peningkatan Produksi Perikanan

No	Produksi	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perikanan Budidaya	Ton	155	39,45	87	115,18
2	Perikanan Tangkap	Ton	5,5	4,064	5,055	4,607

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

3) Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)

Sub sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi merupakan bagian dari sektor Jasa Lainnya yang memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Kontribusi sub sektor ini diukur dengan menghitung nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan di dalamnya.

Kegiatan yang termasuk dalam sub sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi antara lain pertunjukan seni, tarian, musik, teater, sinema, pameran seni, pameran hewan, wahana rekreasi, serta berbagai kegiatan yang terkait dengan pariwisata.

Peningkatan kontribusi sub sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi terhadap PDRB suatu wilayah dapat dicapai dengan pengembangan berbagai kegiatan di dalamnya, seperti dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas acara seni dan hiburan yang diselenggarakan, memperluas wahana rekreasi dan objek pariwisata, meningkatkan promosi dan pemasaran kegiatan seni dan hiburan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Dengan adanya peningkatan kontribusi sub sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi terhadap PDRB, maka dapat membantu meningkatkan perekonomian wilayah dan memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor jasa lainnya di wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan kegiatan seni dan hiburan yang berkualitas juga dapat meningkatkan citra dan daya tarik

suatu wilayah sebagai destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan, serta memberikan nilai tambah dalam membangun identitas dan kekayaan budaya suatu wilayah.

Sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi (Sektor jasa lainnya) merupakan salah satu sub sektor yang tergabung dalam sektor jasa di Indonesia. Sub sektor ini berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah dan dapat memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sub sektor ini memiliki kontribusi sebesar 0,78% terhadap PDRB, di bawah target yang ditetapkan sebesar 1%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor Kesenian, hiburan, dan rekreasi terhadap perekonomian daerah.

Penurunan kontribusi sub sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi terhadap PDRB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan atau kehilangan pekerjaan sehingga mengurangi pengeluaran untuk aktivitas hiburan dan rekreasi. Dampak pandemi ini sangat terasa pada sektor Kesenian, hiburan, dan rekreasi, terutama pada kegiatan yang dilakukan di ruang terbuka seperti konser musik dan festival yang mengalami penurunan peserta.

Selain faktor penurunan daya beli masyarakat, persaingan dari sektor lain seperti sektor perdagangan dan jasa lainnya juga dapat mempengaruhi kontribusi sub sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi terhadap PDRB. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa lainnya, sehingga persaingan antara sub sektor tersebut semakin ketat dan kontribusi sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi tergeser.

Namun, meskipun terjadi penurunan kontribusi sub sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi terhadap PDRB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, masih terdapat peluang untuk mengembangkan sub sektor ini. Salah

satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah potensi wisata di daerah tersebut. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi wisata alam dan budaya yang masih perlu dikembangkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pariwisata di daerah ini dapat meningkatkan kontribusi sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi terhadap PDRB.

4) Realisasi Investasi (PMA/PMDN);

Investasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Melalui investasi, daerah dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, hal ini tidak mudah dilakukan, terutama di daerah yang masih berkembang seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan data rekapitulasi realisasi investasi tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tercatat bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023 mencapai Rp. 2.346.368.577.638,00 atau naik drastis sekitar 11ribu% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000.000,00. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Bolmut. Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikarenakan tidak lepas dari adanya dukungan pemerintah melalui anggaran DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2023, yang tentunya dengan dilaksanakan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan sosialisasi implementasi pengawasan peizinan berusaha berbasis resiko yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utaradan tentunya karena pandemi Covid 19 telah terkendali sehingga aktifitas bisa berjalan normal kembali.

Sasaran 8 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah di daerah memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam mempermudah kehidupan manusia dan membentuk juga struktur ruang wilayah.

Namun demikian, akan ada efek positif sekaligus negatif dalam kegiatan pembangunan, sehingga kita perlu memperhatikan pelaksanaan proses pengembangan. Dalam hal tujuannya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan sasaran 8 (delapan), pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara menggunakan strategi seperti (1), meningkatkan infrastruktur dan utilitas wilayah, khususnya Kawasan strategis dan kumuh. (2), Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan. (3), meningkatkan pengelolaan lingkungan.

Di era saat ini masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembangunan, namun sebagai subyek pembangunan. Air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia. Sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia bercita-cita dapat mencapai *universal access* air minum dan sanitasi. Ini dimaknai bahwa 100% masyarakat mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang layak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025.

Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada pembangunan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar. Untuk infrastruktur jalan berdasarkan data profil daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara panjang jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi atas 5 kelas yaitu: jalan nasional dengan panjang 93.10 km; jalan

Provinsi panjang 17 km; jalan Kabupaten 366.43 km; serta jalan desa/lokal 34.59 km.

Gambar 3.3
Pembangunan Infrastruktur Jalan



Sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2023 ditargetkan Jalan dalam kondisi mantap sebesar 85%. Diketahui bahwa pada Tahun 2023 terdapat perubahan dalam kewenangan Jalan Kabupaten dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 04 Tahun 2023 Penetapan Ruas-Ruas

Jalan Kabupaten Di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga Total Ruas Jalan Kabupaten menjadi 57 Ruas Jalan dari sebelumnya 122 Ruas dengan Panjang total sepanjang 162.97 KM dari sebelumnya sepanjang 394.12 KM. Hasil survei kondisi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten pada pada akhir tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Kondisi Jalan dan Jembatan

No	Jenis Permukaan	Panjang (KM)
1	Aspal/ Penetrasi /Macadam	131.08
2	Perkerasan Beton	0.46
3	Lapen/Latasir/Macadam	5.53
4	Telford/Kerikil	25.90
5	Tanah/Belum Tembus	0
Total		162.97

Sasaran “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan” yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 96,64% kategori SANGAT BERHASIL.

Berikut tabel analisis capaian kinerja tahun 2022 masing-masing indikator pada sasaran 8:

Tabel 3.34
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	85,61	100	87,52	87,52	100,00	87,52
2	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	88,76	90,00	88,02	97,80	90,00	97,80
3	Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH)	%	79,21	76,90	80,43	104,59	76,90	104,59
Rata-Rata Capaian Sasaran 8						96,64		

1) Cakupan *Universal Acces*

Indikator Cakupan Universal Acces dengan target 100% terealisasi 87,52% tingkat capaian sebesar 87,52 % predikat berhasil, walaupun kondisi ini masih jauh dari target universal acces Nasional yakni 100%.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam RPJMD 2018-2023 bercita-cita diakhir periode renstra tahun 2023 dapat mencapai *universal access* air minum dan sanitasi. Layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat. Program pembangunan air minum dan sanitasi ditunjang dengan pendekatan Program Pamsimas yang berbasis masyarakat, Partisipatif dan berkelanjutan. Sedangkan untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga melalui Infrastruktur Sanitasi telah dibangun IPAL Komunal di beberapa Desa. Tolak ukur capaian ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik kuantitas dan kualitas yaitu indikator persentase penduduk berakses air Limbah.

Tabel 3.35
Universal Access

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Capaian air minum layak	Persen	82,92	92,03	94,93	91,02	85,05
Capaian air limbah aman	Persen	73,46	80,43	80,88	70,21	89,58

Sumber Data Laporan Kinerja DPUPR Tahun 2023

a. *Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak*

Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air minum di kawasan perdesaan. Tolak ukur capaian ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai baik kuantitas dan kualitas yaitu indikator persentase penduduk berakses air minum. Adapun pada tahun 2023 ditargetkan persentase penduduk berakses air minum layak adalah 92%.

Tabel 3.36
Pembangunan Dan Pengelolaan Sambungan Rumah (Sr) Air Minum

No	Kecamatan	Bidang Cipta Karya (SR)	UPTD SPAM-PAL (SR)
1	Sangkub	523	
2	Bintauna	1274	
3	Bolangitang Timur	1777	
4	Bolangitang Barat	739	493
5	Kaidipang	1624	1336
6	Pinogaluman	1224	697
TOTAL		7161	2.526
		18.318	

Sumber Data Laporan Kinerja DPUPR Tahun 2023

Dari gambar tabel-tabel diatas dapat dilihat sampai pada Tahun 2023 pembangunan dan Pengelolaan Sambungan Rumah Air Minum sebanyak 18.318 SR yang tersebar di 6 kecamatan melalui kegiatan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten. Diketahui bahwa terdapat juga pengelolaan Sambungan Rumah yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dan Pemerintah Desa melalui APBN dan Dana Desa. Untuk mengukur kinerja pada indikator presentase jumlah penduduk yang memiliki akses air minum layak dapat dilihat pada tabel hasil survey statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh BPS Tahun 2023 dimana air minum

yang layak yaitu kategori leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung/mata air terlindung dengan presentase total mencapai **85.05%**.

b. Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air limbah aman

Untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga melalui Infrastruktur Sanitasi telah dibangun IPAL Komunal di beberapa Desa. Tolak ukur capaian ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik kuantitas dan kualitas yaitu indikator persentase penduduk berakses air limbah. Hasil capaian indikator tersebut pada 2023 dapat di analisis pada gambar tabel berikut :

Tabel 3.37
Akses air limbah aman

Karakteristik	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		Jumlah
	Tangki septik/ IPAL	Lainnya ²	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	89,33	10,67	100,00
Perempuan	91,68	8,32 ³	100,00
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	92,14	7,86 ³	100,00
40 Persen Tengah	90,07	9,93	100,00
20 Persen Teratas	86,36	13,64	100,00
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	86,83	13,17	100,00
SMP ke atas	93,30	6,70 ³	100,00
Bolaang Mongondow Utara	89,58	10,42	100,00

Dari gambar tabel diatas dapat dilihat bahwa Untuk mengukur kinerja pada indikator persentase jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air limbah aman dapat dilihat pada tabel hasil survey statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh BPS

Tahun 2023 dimana akses air limbah aman yaitu kategori tangka septic/IPAL/SPAL dengan presentase total mencapai **89,58%**.

2) *Persentase Kepatuhan terhadap RTRW*

Rencana tata ruang wilayah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan yang dipandang perlu sangat prioritas dan memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan. Rencana tata ruang memuat rancangan yang bersifat umum dan masih diperlukan rencana tata ruang yang merinci dan mengoperasionalkan rencana tata ruang wilayah seperti rencana dasar tata ruang kawasan perkotaan dan rencana tata ruang kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.

Adapun tolok ukur indikator ini yaitu dapat dilihat dari tingkat jumlah rekomendasi kesesuaian ruang yang dikeluarkan bagi para pengguna. Dari data yang diperoleh, diketahui pada tahun 2023 terdapat 213 rekomendasi kesesuaian ruang yang disetujui dan melaksanakan rekomendasi sementara 15 rekomendasi tidak disetujui dari 242 permohonan yang diajukan oleh para pengguna

Kepatuhan terhadap RTRW adalah indicator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang rencana pembangunan RTRW. Sampai dengan tahun 2023, Indikator Persentase Kepatuhan terhadap RTRW dengan target 90% terealisasi 88,02 % tingkat capaian sebesar 97,80% predikat sangat berhasil.

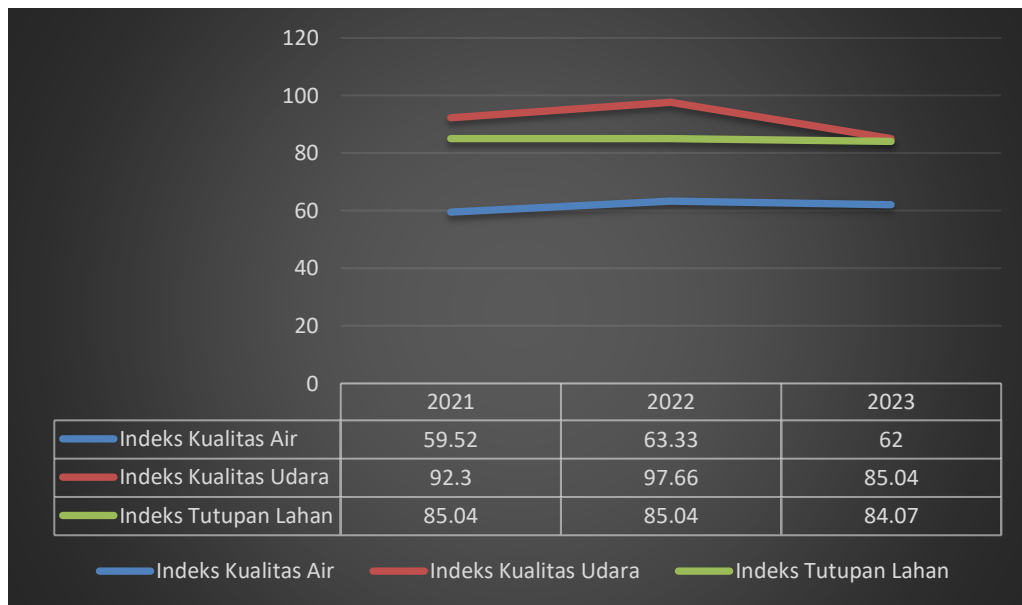
3) *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 76,90% terealisasi 80,43 % tingkat capaian sebesar 104,59% predikat **sangat berhasil**.

Untuk mendapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) unsur parameter yang diukur, 1. Indeks Kualitas Air; 2. Indeks kualitas

udara dan 3. Indeks Tutupan Lahan (vegetasi), hasil pengukuran ketiga parameter ini diuraikan dalam table berikut:

Grafik 3.21
Perkembangan Kualitas Lingkungan



- Hasil pengukuran terhadap indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari 3 (tiga) unsur parameter yang diukur yaitu Indeks Kualitas Air, (62,00 %) Indeks Kualitas Udara (95,57 %), Indeks Tutupan Lahan (84,07%) yang masing-masing menunjukkan hasil yang baik, artinya indeks kualitas lingkungan hidup di kabupaten Bolaang mogondow utara dikategorikan **berhasil** dengan capaian rata-rata di **80,43%**.

- Indeks Kualitas Air : pengukuran kualitas air dilakukan dengan metode pengambilan sampel Air di hulu dan hilir sungai yang terdapat di bolaang mongondow utara. Parameter yang diukur untuk tiap sampel air yaitu pH; BOD; COD; TSS; DO; NO₃-N; Total Phosphat; Fecal Coliform (menggunakan standar baku mutu SNI). Pengukuran IKA ini

Gambar 3.4
Pengukuran Indeks Kualitas Air



menggunakan metode sederhana dengan cara pengambilan sampel air di sumber air kemudian dibawa ke laboratorium terdekat untuk diukur kandungan dari parameter diatas.

Gambar 3.5
Pengukuran Indeks Kualitas Udara



- Indeks Kualitas Udara: Pengambilan sampel udara menggunakan metode *ambien passive sampler*. Metode ini mengambil 4 (empat) titik di setiap kecamatan. Titik pengambilan udara ambien terdiri dari Kawasan perkantoran, Kawasan industri, Kawasan pemukiman, Kawasan transportasi. Dari hasil masing-masing parameter pengambilan sampel menunjukkan bahwa kualitas udara di bolaang mongondow utara berada di dalam kategori baik atau belum tercemar yaitu berada di angka 95,57

terjadi kenaikan indeks Kualitas Air jika dibandingkan dengan hasil uji air di tahun 2022, kenaikan tersebut sebesar 0,84 maka IKU bolaang mongondow utara berada di kategori BAIK dan mencapai target.

- Indeks Tutupan Lahan : Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2023 bersumber dari hasil pengukuran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dipublikasikan melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id/>. Karena untuk bolaang mongondow utara belum menganggarkan untuk pengukuran kualitas tutupan lahan itu sendiri. Dan berdasarkan hasil pengukuran tersebut Bolaang Mongondow Utara memiliki indeks Tutupan Lahan sebesar 84.07 atau dalam kategori baik. Dengan target tahun 2023 sebesar 86 maka Indeks Kualitas Lahan Kab. Bolaang Mongondow Utara dikategorikan berhasil. Demikian hasil pengukuran sasaran strategis 1 yakni indeks kualitas lingkungan hidup di kabupaten bolaang mongondow utara dikategorikan sangat berhasil dengan capaian sebesar 104,59%.

Berdasarkan uraian analisis capaian sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Yang

Berwawasan Lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa capaian atas target dinyatakan sangat berhasil, serta mengalami peningkatan/kemajuan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3.1.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Tabel 3.38
Efisiensi Sumber Daya Biaya

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Capaian (%)	Efisiensi (%)
	ANGGARAN	REALISASI		
BELANJA DAERAH	676.167.166.947,10	635.563.505.417,00	94	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	351.274.183.291,10	322.424.359.659,00	91.79	8.21
PENDIDIKAN	141.148.314.298,00	124.902.085.653,00	88.49	11.51
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.384.213.093,00	87.103.843.089,00	86.77	13.23
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	422.129.728,00	387.312.548,00	91.75	8.25
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.043.592.562,00	37.133.171.888,00	92.73	7.27
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	114.099.715,00	109.826.578,00	96.25	3.75
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	184.279.200,00	167.931.550,00	91.13	8.87
KESEHATAN	130.416.297.637,10	119.457.589.367,00	91.6	8.4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.395.675.985,90	49.104.459.571,00	97.44	2.56
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	71.325.401.107,20	62.500.366.561,00	87.63	12.37
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.252.939.705,90	7.659.629.227,00	92.81	7.19

LKJIP TAHUN 2023
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	37.999.803,10	18.298.400,00	48.15	51.85
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	404.281.035,00	174.835.608,00	43.25	56.75
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	62.135.977.762,00	61.116.655.835,00	98.36	1.64
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.469.213.431,00	5.380.966.545,00	98.39	1.61
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.871.849.847,00	3.613.578.175,00	93.33	6.67
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.619.575.371,00	2.527.474.956,00	96.48	3.52
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	115.600.000,00	115.214.000,00	99.67	0.33
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	215.580.000,00	205.006.700,00	95.1	4.9
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	575.169.446,00	562.089.980,00	97.73	2.27
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	515.505.540,00	507.319.500,00	98.41	1.59
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	642.284.032,00	632.002.850,00	98.4	1.6
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	307.780.500,00	303.858.598,00	98.73	1.27
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	46.961.976.795,00	46.512.503.992,00	99.04	0.96
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	420.502.200,00	412.707.139,00	98.15	1.85
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	420.940.600,00	343.933.400,00	81.71	18.29
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.249.225.073,00	6.022.915.288,00	96.38	3.62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.698.433.974,00	2.581.525.312,00	95.67	4.33
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	310.521.104,00	308.701.800,00	99.41	0.59
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.917.617.670,00	2.811.556.600,00	96.36	3.64
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	103.286.630,00	103.090.400,00	99.81	0.19
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	219.365.695,00	218.041.176,00	99.4	0.6
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4.270.766.009,00	4.207.082.393,00	98.51	1.49

LKJIP TAHUN 2023

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.942.055.405,00	1.927.743.953,00	99.26	0.74
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.853.622.320,00	1.807.471.340,00	97.51	2.49
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	475.088.284,00	471.867.100,00	99.32	0.68
SOSIAL	7.053.602.512,00	6.718.031.123,00	95.24	4.76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.709.957.173,00	5.502.305.943,00	96.36	3.64
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	113.661.350,00	101.575.900,00	89.37	10.63
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	342.920.478,00	327.564.200,00	95.52	4.48
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	182.341.020,00	173.265.130,00	95.02	4.98
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	654.794.055,00	568.085.150,00	86.76	13.24
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	49.928.436,00	45.234.800,00	90.6	9.4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44.692.671.080,00	42.786.047.420,00	95.73	4.27
TENAGA KERJA	2.424.557.033,00	2.269.060.397,00	93.59	6.41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.954.406.881,00	1.876.912.197,00	96.03	3.97
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	49.999.910,00	12.066.800,00	24.13	75.87
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	294.436.800,00	256.636.800,00	87.16	12.84
PANGAN	2.846.784.436,00	2.692.685.186,00	94.59	5.41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.099.764.136,00	1.998.662.005,00	95.19	4.81
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	384.988.884,00	339.248.346,00	88.12	11.88
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	265.638.656,00	259.131.800,00	97.55	2.45
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	96.392.760,00	95.643.035,00	99.22	0.78
LINGKUNGAN HIDUP	5.827.219.301,00	5.568.315.512,00	95.56	4.44
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.794.220.161,00	2.666.628.906,00	95.43	4.57

LKJIP TAHUN 2023

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	129.697.154,00	126.012.900,00	97.16	2.84
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	407.448.577,00	358.468.306,00	87.98	12.02
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	149.707.536,00	135.613.600,00	90.59	9.41
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	51.338.300,00	45.094.000,00	87.84	12.16
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.284.738.016,00	2.227.789.400,00	97.51	2.49
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.234.478.672,00	3.133.875.484,00	96.89	3.11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.757.263.672,00	2.665.440.464,00	96.67	3.33
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	477.215.000,00	468.435.020,00	98.16	1.84
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.875.867.616,00	3.784.797.299,00	97.65	2.35
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.737.140.298,00	2.650.401.595,00	96.83	3.17
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	466.661.912,00	463.936.454,00	99.42	0.58
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	672.065.406,00	670.459.250,00	99.76	0.24
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.055.406.482,00	8.372.833.510,00	92.46	7.54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.393.608.214,00	4.172.966.571,00	94.98	5.02
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	340.406.065,00	328.195.800,00	96.41	3.59
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	572.781.860,00	560.486.584,00	97.85	2.15
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	61.304.690,00	20.130.000,00	32.84	67.16
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.880.302.905,00	1.695.954.103,00	90.2	9.8
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.049.040.800,00	994.531.600,00	94.8	5.2
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	119.603.700,00	115.563.600,00	96.62	3.38
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	638.358.248,00	485.005.252,00	75.98	24.02

LKJIP TAHUN 2023

KABUPATEN BOLAANG MONGDOW UTARA

PERHUBUNGAN	3.228.815.694,00	3.190.428.816,00	98.81	1.19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.501.402.298,00	2.476.864.944,00	99.02	0.98
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	727.413.396,00	713.563.872,00	98.1	1.9
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	4.350.501.590,00	4.241.423.963,00	97.49	2.51
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.187.711.255,00	2.115.210.611,00	96.69	3.31
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	19.990.983,00	18.894.500,00	94.52	5.48
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.081.937.232,00	1.075.521.500,00	99.41	0.59
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.060.862.120,00	1.031.797.352,00	97.26	2.74
PENANAMAN MODAL	3.483.154.263,00	3.356.494.625,00	96.36	3.64
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.612.318.191,00	2.509.086.035,00	96.05	3.95
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	159.900.400,00	159.899.680,00	100	0
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	50.023.720,00	50.023.720,00	100	0
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	123.229.687,00	117.917.900,00	95.69	4.31
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	438.199.465,00	421.727.290,00	96.24	3.76
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	99.482.800,00	97.840.000,00	98.35	1.65
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.050.018.017,00	3.956.614.752,00	97.69	2.31
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.084.449.255,00	2.047.342.439,00	98.22	1.78
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	840.802.091,00	785.878.872,00	93.47	6.53
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	1.124.766.671,00	1.123.393.441,00	99.88	0.12
KEARSIPAN	2.315.867.976,00	2.219.517.876,00	95.84	4.16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.262.901.976,00	2.167.943.376,00	95.8	4.2
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	17.083.600,00	17.033.500,00	99.71	0.29
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	26.882.400,00	26.141.000,00	97.24	2.76
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	9.000.000,00	8.400.000,00	93.33	6.67

LKJIP TAHUN 2023

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38.410.764.509,00	34.486.570.291,00	89.78	10.22
KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.172.644.991,00	4.435.916.676,00	85.76	14.24
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.691.748.655,00	2.562.670.608,00	95.2	4.8
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.377.614.215,00	1.072.465.800,00	77.85	22.15
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.103.282.121,00	800.780.268,00	72.58	27.42
PARIWISATA	3.900.469.516,00	3.780.278.149,00	96.92	3.08
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.755.035.643,00	2.650.474.558,00	96.2	3.8
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	248.115.679,00	236.660.652,00	95.38	4.62
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	897.318.194,00	893.142.939,00	99.53	0.47
PERTANIAN	25.039.761.960,00	22.174.936.678,00	88.56	11.44
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.492.816.956,00	9.973.565.931,00	95.05	4.95
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.120.338.165,00	1.107.266.650,00	98.83	1.17
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.077.294.180,00	9.849.022.481,00	81.55	18.45
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	607.618.775,00	532.405.346,00	87.62	12.38
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	190.699.060,00	185.974.170,00	97.52	2.48
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	550.994.824,00	526.702.100,00	95.59	4.41
PERDAGANGAN	4.297.888.042,00	4.095.438.788,00	95.29	4.71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.476.667.369,00	3.288.825.128,00	94.6	5.4
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	28.035.666,00	25.304.400,00	90.26	9.74
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	129.196.000,00	128.321.050,00	99.32	0.68
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	259.382.480,00	258.775.160,00	99.77	0.23
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	12.000.000,00	12.000.000,00	100	0
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.343.488,00	20.200.000,00	99.29	0.71

LKJIP TAHUN 2023

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	15.000.000,00	14.150.000,00	94.33	5.67
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	357.263.039,00	347.863.050,00	97.37	2.63
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	66.873.406.631,00	65.060.417.144,00	97.29	2.71
SEKRETARIAT DAERAH	40.213.802.177,00	39.014.627.682,00	97.02	2.98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.185.107.222,00	32.192.252.216,00	97.01	2.99
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.078.119.710,00	5.918.371.132,00	97.37	2.63
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	950.575.245,00	904.004.334,00	95.1	4.9
SEKRETARIAT DPRD	26.659.604.454,00	26.045.789.462,00	97.7	2.3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.461.812.703,00	19.069.729.965,00	97.99	2.01
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.197.791.751,00	6.976.059.497,00	96.92	3.08
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	148.178.184.523,00	144.787.012.463,00	97.71	2.29
PERENCANAAN	6.511.788.188,00	6.292.949.582,00	96.64	3.36
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.883.682.622,00	3.709.641.476,00	95.52	4.48
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.224.496.093,00	1.209.299.718,00	98.76	1.24
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	789.085.581,00	777.662.831,00	98.55	1.45
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	614.523.892,00	596.345.557,00	97.04	2.96
KEUANGAN	133.835.069.171,00	131.311.526.076,00	98.11	1.89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.656.651.506,00	11.720.897.123,00	92.61	7.39
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	119.789.780.727,00	118.334.808.539,00	98.79	1.21
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	796.190.912,00	741.527.052,00	93.13	6.87
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	592.446.026,00	496.293.362,00	83.77	16.23
KEPEGAWAIAN	7.831.327.164,00	7.182.536.805,00	91.72	8.28

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.722.713.003,00	3.459.748.569,00	92.94	7.06
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	935.409.048,00	718.800.827,00	76.84	23.16
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.173.205.113,00	3.003.987.409,00	94.67	5.33
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.192.167.136,00	5.969.536.997,00	96.4	3.6
INSPEKTORAT	6.192.167.136,00	5.969.536.997,00	96.4	3.6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.418.111.695,00	4.264.686.044,00	96.53	3.47
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.379.994.810,00	1.353.987.453,00	98.12	1.88
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	394.060.631,00	350.863.500,00	89.04	10.96
UNSUR KEWILAYAHAN	13.448.257.369,00	13.211.602.124,00	98.24	1.76
KECAMATAN	13.448.257.369,00	13.211.602.124,00	98.24	1.76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.248.649.904,00	13.121.842.124,00	99.04	0.96
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	199.607.465,00	89.760.000,00	44.97	55.03
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.097.532.408,00	6.837.959.319,00	96.34	3.66
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.097.532.408,00	6.837.959.319,00	96.34	3.66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.140.352.391,00	1.130.813.200,00	99.16	0.84
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	59.957.489,00	59.948.591,00	99.99	0.01
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.897.222.528,00	5.647.197.528,00	95.76	4.24

3.1.3. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai diatas, analisis dilakukan terhadap realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Penjelasan-penjelasan mengenai komponen operasionalisasi kinerja, mengenai keberhasilan dan kegagalan

serta upaya-upaya yang dilakukan dan harapan kedepan untuk peningkatan kinerja. Dibawah ini kami uraikan hasil analisis dan evaluasi tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 setelah dilakukan pengukuran kinerja.

Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2023 yang mendukung tercapainya target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.39
Program yang mendukung Pencapaian Tiap Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi 1: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
Program pembinaan Sejarah
Program pengembangan kebudayaan
Program pengelolaan Pendidikan
Program pengembangan kurikulum
Program pengelolaan arsip
Program perlindungan dan penyelamatan arsip
Program pembinaan perpustakaan
Program pengembangan kurikulum
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Masyarakat
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
Sasaran 3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
Program penanganan kerawanan pangan
Program pengawasan keamanan pangan
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat
Program pemberdayaan social
Program penanganan bencana
Program perlindungan dan jaminan social
Program rehabilitasi social
Sasaran 4: Menurunnya beban pengeluaran keluarga
Program hubungan industrial
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
Program perencanaan tenaga kerja
Program pengembangan kawasan transmigrasi
Program pemenuhan hak anak (pha)
Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan
Program peningkatan kualitas keluarga
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
Program pembinaan keluarga berencana
Program pengendalian penduduk
Misi 2: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and Clean Government)
Tujuan 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
Sasaran 5: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Program penyelenggaraan pengawasan
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
Program kepegawaian daerah
Program pengelolaan barang milik daerah
Program pengelolaan keuangan daerah
Program pengelolaan pendapatan daerah
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program pengembangan sumber daya manusia
Program penelitian dan pengembangan daerah
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Program perekonomian dan Pembangunan
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd
Program aplikasi informatika
Program informasi dan komunikasi public
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
Program penyelenggaraan statistik sectoral
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
Sasaran 6: Meningkatnya pelayanan public
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
Program penanggulangan bencana
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
Program administrasi pemerintahan desa
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata
Tujuan 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan
Sasaran 7: Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah (lokal)
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
Program penyuluhan pertanian
Program pengelolaan perikanan budidaya
Program pengelolaan perikanan tangkap
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Program pemasaran pariwisata
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
Program pendidikan dan latihan perkoperasian
Program pengembangan umkm
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Program standardisasi dan perlindungan konsumen
Program perencanaan dan pembangunan industry
Program pelayanan penanaman modal
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
Program pengembangan iklim penanaman modal
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
Program promosi penanaman modal
Misi 4: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya
Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
Sasaran 8: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
Program penataan bangunan dan lingkungannya
Program penataan bangunan Gedung
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
Program pengelolaan sumber daya air (SDA)

Program pengembangan jasa konstruksi
Program pengembangan permukiman
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
Program penyelenggaraan jalan
Program penatagunaan tanah
Program kawasan permukiman
Program pengembangan perumahan
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
Program penyelenggaraan penataan ruang
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
Program pengelolaan persampahan
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Program penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat
Program perencanaan lingkungan hidup

3.2. Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2023 berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini memperlihatkan bahwa manajemen kinerja keuangan sudah memuaskan. Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah berbasis akrual, dengan unsur laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Untuk tahun anggaran 2023 pemeriksaan rinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sementara dilaksanakan, sehingga gambaran akuntabilitas keuangan yang disajikan berikut ini masih bersifat sementara dan bersumber dari

data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 yang telah diajukan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk pelaksanaan audit rinci.

APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat demi tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian tujuan bernegara pada konteks Pemerintah Daerah dimaksud sangat dipengaruhi dengan capaian target kinerja pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 627.006.370.615,00 terealisasi Rp 621.368.080.539,84 atau 99,10%. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lani-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 40
Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.921.788.698,00	16.397.988.688,84	117.78
Pendapatan Pajak Daerah	5.422.500.000,00	5.947.174.351,83	109.67
Pendapatan Retribusi Daerah	1.279.250.000,00	1.378.675.912,00	107.77
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00	100.00
Lain-lain PAD Yang Sah	6.157.869.587,00	8.009.969.314,01	130.07

Sumber : LKPD Unaudited 2023

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 41
Capaian Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	583.262.342.965,00	571.784.677.336,00	98.03
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.931.549.549,00	19.708.020.356,00	104.10
Jumlah		602.193.892.514,00	591.492.697.692,00	98,22

Sumber : LKPD Unaudited 2023

Capaian target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dari total yang ditargetkan pada APBD sebesar Rp 602.193.892.514,00 dapat direalisasi sebesar Rp 591.492.697.692,00 atau 98,22% meskipun demikian terdapat peningkatan dana Transfer Antar Daerah Rp 776.470.807 atau 4,10% dari besaran pendapatan yang ditargetkan.

Secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2023 berdasarkan obyek dan rincian obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 42
Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Saha

Uraian	Tahun 2023		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN	627.006.370.615,00	621.368.080.539,84	99,10
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.921.788.698,00	16.397.988.688,84	117.78
Pendapatan Pajak Daerah	5.422.500.000,00	5.947.174.351,83	109.67
Pendapatan Retribusi Daerah	1.279.250.000,00	1.378.675.912,00	107.77
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00	100.00
Lain-lain PAD Yang Sah	6.157.869.587,00	8.009.969.314,01	130.07
PENDAPATAN TRANSFER	602.193.892.514,00	591.492.697.692,00	98,22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	583.262.342.965,00	571.784.677.336,00	98.03
Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.931.549.549,00	19.708.020.356,00	104.10
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.890.689.403,00	13.477.394.159,00	123.75
Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.890.689.403,00	13.477.394.159,00	123.75

Sumber : LKPD Unaudited 2023

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 20 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam setahun. Definisi lainnya mengenai belanja seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP 58 Tahun 2005 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, definisi belanja ini sama dengan definisi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah meliputi belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2023 mencapai 95,15% dari total yang dianggarkan sebesar Rp. 371.228.812.370,00 atau terealisasi sebesar Rp. 353.216.355.350,00.

Persentase dari setiap jenis belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 43
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2023

No	Uraian	Tahun 2023		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pegawai	236.412.477.623,00	220.054.148.469,00	93.08
2	Belanja Subsidi	70.000.000,00	70.000.000,00	100.00
3	Belanja Hibah	13.626.671.281,00	12.991.445.181,00	95.34
4	Belanja Bantuan Sosial	3.739.500.000,00	3.607.536.000,00	96.47
5	Belanja Bantuan Keuangan	116.435.493.700,00	116.435.493.700,00	100.00
6	Belanja Bagi Hasil	928,537,091.00	470,988,670.00	50.72
7	Belanja Tidak Terduga	944.669.766,00	57.732.000,00	6.11
J u m l a h		372,157,349,461.00	353,687,344,020.00	95.04

Sumber : LKPD Unaudited 2023

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), dan Rencana kerja SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur dan belanja beasiswa pendidikan. Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 354.981.942.005,00 terealisasi Rp.

315.354.588.696,65 atau tingkat capaian 88,84% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 44
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2023

No	Uraian	Tahun 2023		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang Jasa	189.518.505.326,10	175.367.668.266,00	92.53
2	Belanja Modal	114.491.312.160,00	106.508.493.131,00	93.03
Total Belanja		304,009,817,486.10	281,876,161,397.00	92.72

Sumber : LKPD Unaudited 2023

Dari tabel diatas juga dapat di jelaskan bahwa belanja langsung tahun anggaran 2023 didominasi oleh belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp. 189.518.505.326,10 atau sebesar 62,34% dari total belanja langsung, sedangkan belanja modal sejumlah Rp. 114.491.312.160,00 atau sebesar 37,66%. Selanjutnya dapat dijelaskan realisasi anggaran dan proporsi belanja daerah terhadap total belanja APBD pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 45
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung TA. 2023

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja tidak langsung	372,157,349,461.00	353,687,344,020.00	95,04
2	Belanja langsung	304,009,817,486.10	281,876,161,397.00	92.72
Total Belanja		676,167,166,947.10	635,563,505,417.00	94,00

Sumber : LKPD Unaudited 2023

Tabel 3. 46
Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah TA. 2023

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
Belanja tidak langsung	372,157,349,461.00	55,04
Belanja langsung	304,009,817,486.10	44,96
Total Belanja	676,167,166,947.10	100

Sumber : LKPD Unaudited 2023

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa proporsi belanja tidak langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 372.157.349.461,00 atau 55,04% dari total belanja daerah,

sedangkan proporsi belanja langsung sebesar Rp. 304.009.817.486,10 atau 44,96%.



BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (performance results) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2018-2023 dan telah memenuhi 4 (empat) tujuan dan 8 (delapan) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan. Dari hasil analisis terhadap keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui 4 tujuan dan 8 sasaran sebesar **98,78%** atau kategori capaian kinerja **“Sangat Berhasil”** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian tujuan dan sasaran yang mencakup pada capaian tujuan terdapat 2 tujuan dan 4 indikator dalam kategori sangat berhasil dan 2 tujuan dan 2 indikator dalam kategori sangat berhasil sedangkan pada capaian sasaran terdapat 6 sasaran dan 11 indikator dalam kategori sangat berhasil, 2 sasaran dan 4 indikator berada pada kategori berhasil, serta 2 indikator masuk kategori cukup berhasil.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **676.167.166.947,10,-** dengan realisasi sebesar Rp. **635.563.505.417,00,-** atau **94%**. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD 2018-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Implementasi proses bisnis dalam penyusunan perencanaan anggaran menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di masa-masa mendatang.

Beroko, 18 Maret 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

SIRAJUDIN LASENA







LAMPIRAN









**DAFTAR PENGHARGAAN
DIRAIH TAHUN 2023**




NO	INSTANSI (SUMBER)	TANGGAL	JENIS PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7
1	BKPSDM		Piagam Penghargaan	BKN	Atas Capaian Penyelesaian Disparitas Data ASN Tahun 2023 Sewilayah Kantor Regional XI Manado	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25 Oktober 2023	Piagam Penghargaan	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Atas Tarian Mojoke yang berasal dari Kab. Bolaang Mongondow Utara sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia	

3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22-Nov-23	Piagam Penghargaan	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. Sulut	Terbaik II Kategori Partisipasi Peserta Didik dalam Asesmen Nasional	
4	DPPKBPP PA	22 Juli 2023	Piagam Penghargaan	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2023	
5	DPPKBPP PA	13 Desember 2023	Piala Penghargaan	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	sebagai Kabupaten penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2022 Kategori Madya	

6	DPPKBPP PA		Piagam Penghargaan	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	sebagai Juara I Kabupaten/Kota terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Utara kategori Capaian Pelayanan KB Pasca Salin	
7	DPPKBPP PA		Piagam Penghargaan	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	sebagai Juara I Kabupaten/Kota terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Utara kategori Laporan Sistem Informasi Keluarga	
8	DPPKBPP PA		Piagam Penghargaan	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	Pelaksana Terbaik Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023	

9	DPPKBPP PA		Piagam Penghargaan	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	sebagai Juara II Kabupaten/Kota terbaik tingkat Provinsi kategori total capaian pelayanan KB sejuta akseptor	
10	DPPKBPP PA		Piagam Penghargaan	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	sebagai Juara III Kabupaten/Kota terbaik tingkat Provinsi kategori Pelayanan KB MKJP	
11	BAPELITBANGDA	Apr-23	Piagam Penghargaan	Gubernur Sulawesi Utara	Sebagai Terbaik I Kategori Akses Sanitasi Layak dalam Penilaian Anugerah Sulawesi Utara Sensanitasional Award Tahun 2023	

12	Dinas Kesehatan	13 November 2023	Piagam Penghargaan	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	
13	Dinas Kesehatan		Sertifikat Penghargaan	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Atas Keberhasilan Mencapai Taerget Non-Polio AFP (NPAPF) Rate ≥ 2 per 100.000 penduduk pada Tahun 2022	
14	Bagian Pemerintahan Setda	29-Apr-23	Piagam Penghargaan	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Skor 3,05 dan Status Kinerja Sedang Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022	

15	Dinas Kesehatan	14 Maret 2023	Piagam Penghargaan	Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan Universal Health Coverage (UHC)	
16	Dinas Kesehatan	18 Oktober 2023	Piagam Penghargaan	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Penghargaan Penurunan Stunting Tahun 2023	
17	Bagian Hukum	11/15/2023	Piagam Penghargaan	Menteri Hukum dan HAM RI	Mendapatkan predikat Kab/Kota Pedulu Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dalam Rangkaian Peringatan hari HAM sedunia ke-75 Tahun 2023	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa sesuai hasil rewiu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2023;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 09/M.PAN.05.2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2018 – 2023.**

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2 . . .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 12 TAHUN
 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 UTARA TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023
 FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<p>► Formulasi pengukuran : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	<p>► Formulasi pengukuran : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	<p>► Formulasi pengukuran : Jumlah penduduk (usia di atas 15 tahun) yang bisa menulis : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Kesehatan
4	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya beli)	<p>► Formulasi pengukuran : Rata-rata pengeluaran perkapita per tahun pada tahun: IHK tahun t x 100</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	Gini Ratio	<p>► Formulasi pengukuran : Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah G 0,3 < G < 0,5 = ketimpangan Sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>► Formulasi pengukuran : Jumlah Pengangguran : Angkatan Kerja x 100%</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
7	Persentase Keluarga Sejahtera	▶ Formulasi pengukuran : $\frac{(KS\ III + KS\ III\ Plus)}{Total\ KS\ I\ s.d\ KS\ III\ Plus} \times 100\%$	DPPKBPPPA
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
8	Opini BPK	▶ Formulasi pengukuran : Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	▶ Formulasi pengukuran : 1.00 - 1.80 = Sangat Rendah 1.81 - 2.60 = Rendah 2.61 - 3.40 = Sedang 3.41 - 4.20 = Tinggi 4.21 - 5.00 = Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
10	Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	▶ Formulasi pengukuran : Rata-rata IKM: Jumlah SKPD yang dinilai x 100%	Sekretariat Daerah
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
11	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	▶ Formulasi pengukuran : PDRB sektor pertanian : Total PDRB x 100%	Dinas Pertanian
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
12	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	▶ Formulasi pengukuran : PDRB sub sektor perikanan : Total PDRB x 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
13	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	▶ Formulasi pengukuran : PDRB sub sektor kesenian, hiburan dan rekreasi: Total PDRB sektor jasa lainnya x 100%	Dinas Pariwisata
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
14	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	▶ Formulasi pengukuran : Jumlah Nilai Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
15	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	▶ Formulasi Pengukuran : Persentase ketersediaan jalan kondisi mantap + Persentase daerah irigasi kabupaten kondisi baik : 2 x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	

16	Cakupan <i>Universal Access</i>	<p>► Formulasi pengukuran : ((%Cakupan akses terhadap air bersih + (100-% kawasan kumuh) + %Cakupan akses terhadap sanitasi)) : 3 x 100%</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	<p>► Formulasi Pengukuran : Jumlah pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai rekomendasi : Jumlah rekomendasi yang diterbitkan x 100%</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p>► Formulasi pengukuran : $IKLH = (IPA+IPU+ITH)/3$ IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

